

**STRATEGI KOMUNIKASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN DALAM MENINGKATKAN
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Buton**



OLEH :

**LA ODE ASMANANG
NPM : 151701001**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

**STRATEGI KOMUNIKASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN DALAM MENINGKATKAN
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

SKRIPSI

Oleh :

**LA ODE ASMANANG
151701001**

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Ansar Suherman, S.IP.,M.I.Kom.
NIDN. 0911118107**

**Hastuti, S.Sos.,M.I.Kom.
NIDN.0917038808**

**Mengetahui
Ketua Program Studi**

**Ansar Suherman, S.IP.,M.I.Kom.
NIDN. 0911118107**

LEMBAR PENGESAHAN

**STRATEGI KOMUNIKASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN DALAM MENINGKATKAN
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

SKRIPSI

Oleh :

**LA ODE ASMANANG
NPM. 151701001**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan lulus
Pada Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton
Pada Tanggal :

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua : Ansar Suherman, S.IP., M.I.Kom (.....)

Sekretaris : Muh. Hidayatullah, S.M., M.I.Kom (.....)

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I : Ayub Dwi Anggoro, M.Si.,Ph.D (.....)

Penguji II : Harry Fajar Maulana, S.Sos.,M.I.Kom (.....)

Penguji III : Wa Nurfida, S.Sos.,M.I.Kom (.....)

**Mengetahui,
Plt. Dekan FISIP**

**Anwar Sadat, S.Sos.,M.S.P
NIDN. 0931126624**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : LA ODE ASMANANG
Nomor Mahasiswa : 151701001
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Muhammadiyah Buton

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif**” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Baubau, 31 Desember 2021

Yang Menyatakan

LA ODE ASMANANG
NPM. 151701001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan Judul “**Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif**” ini dapat dirampungkan walaupun dengan tertatih-tatih. Sholawat dan salam senantiasa di curahkan kepada Baginda Rasulullah SAW karena berkat perjuangan beliau yang mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Penulisan dan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan bahkan masih jauh dari tujuan keilmiahan yang diharapkan, oleh karena itu penulis sangat berbesar hati menerima berbagai saran dan kritik guna menyempurnakan skripsi yang telah penulis susun.

Disisi lain dalam proses penyusunan skripsi sebagai tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak pengalaman serta ilmu yang melengkapi ilmu yang di dapat saat dibangku perkuliahan. Dalam proses penyusunan skripsi pula, penulis mendapatkan banyak hal yang tidak bisa terlupakan serta bisa menjadi bekal penulis dalam terjun di masyarakat maupun dunia kerja suatu saat nanti.

Alhamdulillah kami sudah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan peluh, tenaga, pikiran tercurah dan akhirnya helaan napas kelegaan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan atas kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, kepada :

1. Keluarga tercinta saya Ibunda Wa Ode Mizana, istri saya Marwati, A.Md.Kom dan putra-putra saya LM Fadli Muharram dan LM Rahmat Al-Munawar atas dukungan selama masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Buton.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Ibu Dr. Wa Ode Al Zarliani, SP, MM selaku rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
3. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Buton Bapak Dr. Samritin, S.Pd., M.Pd atas bimbingan selama proses perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Buton.
4. Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Buton Bapak Dr (cand) Syamsul Bahri Bahar, ST.,MT. yang banyak memberikan bantuan baik materi maupun non materi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Buton.
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Drs.H. Mansur, M.Si atas kontribusinya dalam penulisan skripsi ini.
6. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Anwar Sadat, S.Sos.,M.I.P atas perhatiannya selama masa semester-semester akhir penulis menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Buton.
7. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Universitas Muhammadiyah Buton Bapak Dr (cand) Ansar Suherman, S.IP, M.I.Kom yang juga bertindak sebagai Penasehat Akademik serta Pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini atas dukungan moril yang tulus, ikhlas yang tidak bisa penulis lupakan selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Buton.
8. Dosen Pembimbing II Ibu Hastuti, S.Sos.,M.I.Kom, atas waktu dan ilmu yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.

9. Penguji I Bapak Ayub Dwi Anggoro, M.Si., Ph.D atas kritik dan saran yang sangat membangun demi kualitas terhadap skripsi yang penulis susun.
10. Penguji II Bapak Harry Fajar Maulana, S.Sos.,M.Si yang sudah memberikan masukan terbaik demi kualitas skripsi yang penulis susun.
11. Penguji III Ibu Wa Nurfida, S.Sos.,M.I.Kom atas ilmu yang sudah dicurahkan selama menjalan perkuliahan di kampus UM Buton.
12. Dosen Ilmu Komunikasi Bapak Muhammad Rizal Ardiansah Putra, S.Kom, M.I.Kom atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan di UM Buton.
13. Dosen Ilmu Komunikasi Muhammad Hidayatullah, SM.,M.I.Kom atas inspirasi dan ilmunya selama proses menimba ilmu di kampus UM Buton.
14. Terima kasih kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Bapak Dr (Cand) Mahyudin, S.Sos.,M.Si atas waktu dan kesempatannya sebagai informan dan juga bertindak sebagai pimpinan yang bijaksana.
15. Terima kasih pula kepada rekan-rekan angkatan 2017 yang berjuang dan melangkah bersama untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S-1 pada Program Studi Ilmu Komunikasi yakni Herman, Ahmad Yusuf, Jumawati dan Irfan J, kalian adalah teman-teman terbaik.
16. Adik-adik angkatan 2018 yang menjadi menjadi kebanggaan yang juga memiliki andil dalam perkuliahan di UM Buton yakni Jumadil, Ferdi, Sahreza Maulana, Wa Ode Rhevi Silviani A, Suci Sawalia, Ifal, La Ode La Maldi, La Ode Nirсан, Darno dan masih banyak lagi yang penulis tidak sebutkan satu persatu.
17. Adik-adik Angkatan 2019 yang turut memberikan support selama menempuh perkuliahan di UM Buton yakni Nurtang, Wa Ode Muthmainnah, Nabila Salam, dan kawan-kawan.

18. Adik-adik Angkatan 2020 yang menjadi warna tersendiri selama menempuh perkuliahan di semester-semester akhir yakni Jundi Sahrul Ramadhan, Ahmad Peropa, Inayah Raihan Salsabila, Erlina Sri Khadijatun Haqqu, Inayah Wulandari dan kawan-kawan.

19. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada adik-adik Program Studi Ilmu Pemerintahan yakni Ahmad Muhardin Hadmar, Rian Andika, Indra Gavano, Masfandi dan kawan-kawan.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat secara proporsional yang juga mampu memberikan kontribusi akademis.

Baubau, Januari 2022

Penulis,

La Ode Asmanang

ABSTRAK

Rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Buton Selatan dalam pengawasan pemilu yang ditandai dengan minimnya laporan masyarakat terhadap adanya pelanggaran pemilu yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menjadi masalah yang krusial dalam pengawasan pemilu. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut maka peneliti yang bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi partisipan, literature review dan dokumentasi. Penelitian ini melalui beberapa proses diantaranya melakukan analisis data secara terus-menerus sejak awal penelitian dan selama proses penelitian, setelah data berhasil dikumpulkan melalui pengamatan langsung (observasi), wawancara dengan informan dan mendapatkan arsip/dokumen, maka kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan peneliti agar lebih focus pada rumusan masalah yang ingin dicapai, selanjutnya mereduksi data, kemudian disimpulkan dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan obyek penelitian di Kantor Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.

Program desa binaan pengawasan partisipatif, pembentukan kader muda pengawasan, Bawaslu go to school, SKPP adalah strategi komunikasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif yang kemudian sebagai korelasi antar komponen dalam strategi komunikasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan memperhatikan faktor-faktor antara lain: a) Mengenali sasaran komunikasi, b) Pemilihan media komunikasi, c) Pengkajian tujuan pesan komunikasi, d) Peran komunikator dalam komunikasi.

Kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam melaksanakan program-program yang sudah dilaksanakan adalah dengan kendala alam yakni adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan adanya social distancing hingga PSBB yang menyebabkan beberapa program yang sudah mulai dilaksanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut pula berimbas pada penganggaran yang dialokasikan untuk program-program Bawaslu Buton Selatan dialihkan untuk penanganan covid-19.

Kata Kunci : *komunikasi organisasi, pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan*

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. LANDASAN TEORI	13
1. Penelitian terdahulu.....	13
2. Komunikasi Organisasi	15
2.1. Definisi Komunikasi Organisasi.....	15
2.2. Komponen Komunikasi Organisasi	22
2.3. Tujuan Komunikasi Organisasi	27
2.4. Fungsi Komunikasi Organisasi.....	30
2.5. Saluran Komunikasi Organisasi	34
2.6. Hambatan dalam Komunikasi Organisasi.....	36
3. Strategi Komunikasi Organisasi	38
3.1. Tinjauan tentang Strategi Komunikasi.....	38
3.2. Tujuan Strategi Komunikasi	41
3.3. Fungsi Strategi Komunikasi	42
3.4. Tahapan Strategi Komunikasi	42

3.5.	Faktor Penting dalam Strategi Komunikasi	44
3.6.	Korelasi Antar komponen dalam Strategi Komunikasi.....	47
4.	Pengawasan Pemilu Partisipatif.....	50
B.	KERANGKA PIKIR	52
BAB III METODE PENELITIAN.....		53
A.	Jenis Penelitian.....	53
B.	Sumber Data.....	53
1.	Data Primer	53
2.	Data Sekunder	54
C.	Teknik Pengumpulan Data	54
D.	Teknik Analisis Data.....	57
E.	Tempat dan Jadwal Penelitian.....	58
1.	Tempat Penelitian.....	58
2.	Jadwal Penelitian.....	59
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN		60
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
1.	Sejarah Singkat Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.....	60
1.1.	Visi Dan Misi	62
1.2.	Struktur Organisasi.....	62
1.3.	Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Buton Selatan ..	64
1.4.	Logo Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.....	69
1.5.	Saluran Komunikasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.....	70
B.	Strategi Komunikasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif	73
1.	Pembentukan Desa binaan pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.....	73
2.	Pembentukan Kader Muda Pengawasan.....	79
3.	Program Bawaslu Busel go to school	80
4.	Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)	81
5.	Hubungan antar komponen dalam strategi komunikasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan	83

6. Kendala dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Buton Selatan	88
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laporan dan Temuan Pelanggaran Pilbup 2017, Pilgub 2018 dan Pemilu 2019 dalam Penanganan Pelanggaran oleh Panwaslu/Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.	22
Tabel 3	Tabel Fungsi Komunikasi Organisasi	44
Tabel 4	Hambatan komunikasi organisasi	50
Tabel 5	Pengelompokan partisipasi masyarakat dalam pemilu berdasarkan manfaatnya.	63
Tabel 6	Daftar Informan penelitian	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1.Sistim Organisasi	Komunikasi	29
Gambar	2.2 Proses Organisasi	Komunikasi	30
Gambar	2.3 Paradigma organisasi	komunikasi	32
Gambar	2.4 Komunikasi Berdasarkan Organisasi	Organisasi Struktur	35
Gambar	2.5. Tujuan dan Komunikasi		42
Gambar	4.1. Logo Bawaslu Kabupaten Buton Selatan		82

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pikir	65
Bagan 2 Struktur Organisasi Bawaslu Kab. Buton Selatan	76

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu/pemilihan sejatinya berjalan secara adil dimana setiap kontestan atau peserta pemilu/pemilihan dapat bertarung secara setara dengan kemampuan visi, misi dan program bagi perubahan kehidupan masyarakat selama lima tahun dalam masa kepemimpinannya, hasil yang setara dengan perjuangan yang adil inilah yang membawa pada perubahan kehidupan demokrasi dan pembangunan masyarakat yang lebih bermanfaat.

Kondisi ideal yang diharapkan pada saat penyelenggaraan pemilu/pemilihan adalah proses kontestasi yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung integritas dan martabat penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil bagi penyelenggara pemilu, kontestan pemilu/pemilihan serta masyarakat yang menjadi pemilih pada pemilu/pemilihan yang didukung oleh proses komunikasi yang baik antara semua pihak.

Jika Pemilu erat dengan permasalahan politik transaksi, politik identitas, dan politik dinasti maka tidak hanya gagasan penyelenggara pemilu berikut peraturan-peraturannya melainkan juga pikiran kolektif masyarakat sangat diperlukan dalam hal pengawasan pemilu untuk mencapai tujuan bersama, pemilu berkeadilan dan kesejahteraan rakyat.

Sangat disayangkan bahwa fenomena potensi dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu/pemilihan di Indonesia masih sering terjadi baik

itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh kontestan calon/peserta pemilu, juga dapat melibatkan masyarakat/pemilih atau kelompok masyarakat. Masyarakat sebagai pemilih sangat dekat dengan potensi dugaan pelanggaran misalnya saja sebagai objek politik uang, menerima uang atau materi lainnya selain bahan kampanye yang ukuran, bahan dan nilainya ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan(Rakhman, 2020).

Pengawasan partisipatif, adalah upaya mendekatkan masyarakat dalam pelaksanaan tahapan untuk mampu mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan, yang setiap tahapannya memiliki banyak potensi dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan. Meningkatnya manfaat kontingen demokrasi memberi makna “demokrasi-sejati”, insentif untuk mengundang pengamat, menghasilkan keyakinan yang meluas hanya bahwa semua demokrat sejati mengundang pengawas pemilu; karena itu, tidak mengundang pengamat menjadi sinyal yang tidak ambigu bahwa pemerintah tidak mendemokratisasi bahkan memberikan alasan pseudo-demokrat untuk mengundang pengamat dan mengambil laporan resiko negatif (Hyde, 2011).

Detil dan jarak dugaan pelanggaran yang sangat dekat di masyarakat, orang perorang, rumah ke rumah, RT, RW, lingkungan terdekat, menjadikan masyarakat sebagai bagian penentu pemilu/pemilihan yang berintegritas dan bermartabat, meskipun kunci untuk penentunya para kontestan dan penyelenggara. Masyarakat bisa jadi belum mengerti peraturan mana yang dilanggar dan bagaimana seharusnya masyarakat harus bertindak dalam setiap

tahapan pemilu demikian pula bagaimana menyikapi setiap potensi dugaan dugaan pelanggaran(Rakhman, 2020).

Di Indonesia Pengawas pemilu secara kelembagaan yang memiliki keterbatasan secara kuantitas, sangat tidak mungkin menjangkau pengawasan setiap tahapan di seluruh wilayah dan pemilih sampai jarak terdekat personal dan rumah kerumah, sebut saja pengawas pemilu tingkat kelurahan/desa yang berjumlah 1 (satu) orang untuk mengawasi satu kelurahan/desa, pengawas pemilu tingkat kecamatan hanya berjumlah 3 (tiga) orang untuk mengawasi satu kecamatan.

Secara kelembagaan pengawasan pemilu di Indonesia didelegasikan kepada Lembaga Bawaslu secara hirarkis dari tingkat pusat atau nasional hingga level terendah yakni Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bawaslu Kabupaten Buton Selatan sebagai bagian dari Bawaslu yang berkedudukan tingkat Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagaimana tersurat dalam UU No.7 tahun 2017 tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada pasal 102 ayat (d) :”*meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di Wilayah Kabupaten/kota.*”

Sebagai suatu organisasi Bawaslu memiliki perangkat dan sistim-sistim yang dalam menjalankan roda organisasi atau untuk mencapai tujuan organisasi memerlukan komunikasi aktif dari setiap elemen atau sub sistim

di dalamnya. Untuk merealisasikan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh Konstitusi dan salah satunya adalah dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 104 huruf (f), Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

Bawaslu Kabupaten Buton sebagai sebuah organisasi dalam menjalankan aktifitasnya tidak terlepas dari peranan komunikasi sebagaimana diungkapkan Brent & Stewart dalam bukunya Komunikasi dan Perilaku Manusia bahwa dalam sebuah organisasi, komunikasi diibaratkan sebagai darah dalam tubuh. Aktivitas komunikasi itulah yang mengantar perintah dari atasan ke bawahan; menyampaikan laporan dari bawahan ke atasan; atau mengabarkan informasi antarposisi yang setara atau antarstaf. Dengan adanya lalulintas perintah, laporan dan informasi tersebut membuat organisasi bekerja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Bayangkan andaikan komunikasi dalam organisasi itu terhenti, tak ada lagi perintah dan laporan organisasi pun berhenti bekerja. Jika keadaan seperti terus berlangsung sampai waktu yang lama organisasipun bisa bubar.(Ruben, 2013)

Terhadap kewajiban peningkatan dan pengembangan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan memiliki langkah atau strategi komunikasi yang ditempuh untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut ambil peran dalam pengawasan pemilu/pemilihan.

Bentuk partisipasi paling minimal dari pemilih atau warga negara yang menjadi wajib pilih dalam pemilu dan pemilihan adalah bagaimana mereka mau datang dan menggunakan hak pilihnya. Partisipasi masyarakat pada level yang lebih tinggi yang bukan hanya sekedar menggunakan hak memilih adalah ketika mereka mau terlibat dalam proses pendidikan pemilih atau bahkan melakukan pemantauan pemilu. Partisipasi pemilu dalam pemantauan membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih, seperti pengetahuan atas isu pemilu dan pelanggaran pemilu. Secara sederhana, partisipasi masyarakat dalam pemilu, baik bentuknya terlibat dalam sosialisasi, survey, pendidikan, dan pemantauan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk melakukan sosialisasi pemilu secara maksimal sekaligus memantau pelanggaran yang terjadi. Dengan masifnya aktivitas tersebut, maka diharapkan pula partisipasi akan tinggi. (Afifuddin, 2020)

Sehubungan dengan hal di atas bahwa serangkaian aktivitas sosialisasi, survey dan pemantauan pemilu adalah implementasi dari strategi komunikasi organisasi bawaslu untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Bawaslu mengharapkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan level yang lebih tinggi dimana masyarakat secara aktif untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran pemilu yang mereka lihat dan ketahui selama proses penyelenggaraan pemilu misalnya dalam tahapan kampanye pemilihan umum oleh partai politik atau pasangan calon peserta pemilu terdapat adanya penyebaran berita hoax, hate speech (ujaran kebencian) yang mengarah kepada pelanggaran SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) serta

maraknya *money politic*. Faktanya adalah nyaris tidak ada laporan masyarakat terhadap berbagai macam pelanggaran pemilu yang tersampaikan kepada Bawaslu dengan kata lain partisipasi masyarakat hanya berada pada bentuk partisipasi minimal yakni datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih saja.

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu menjadi salah satu area kajian yang sangat diminati. Pemilu sebagai instrument pergantian kepemimpinan politik secara regular, damai dan partisipatif, sebagai instrument partisipasi rakyat dalam politik dan pemerintahan (melalui fungsi partisipasi rakyat dalam pemilihan kepemimpinan politik), serta instrument partisipasi rakyat dalam mengevaluasi kinerja kepemimpinan politik (*reward and punishment*), menumpukkan keterlibatan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam proses electoral. Namun umumnya studi difokuskan kepada kajian politik atas partisipasi dalam kampanye *voters turnout*, misalnya studi yang dilakukan oleh (Pitri Yandri, 2017)

Dari sudut pandang Bawaslu untuk mengetahui atau mengukur tinggi rendahnya pengawasan partisipatif masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan adalah dilihat dari jumlah penanganan pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu. Penanganan pelanggaran oleh Bawaslu terdiri dari dua kategori yakni berupa temuan dan laporan. Temun dalam penanganan pelanggaran adalah potensi dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan yang bersumber dari temuan oleh Bawaslu dari hasil pengawasan pemilu/pemilihan yang dilakukan oleh internal Bawaslu dengan melibatkan SDM dan sub

sistim di bawahnya sedangkan laporan dalam penanganan pelanggaran adalah laporan masyarakat berupa dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan selama tahapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang dilaporkan kepada Bawaslu untuk dilakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan masyarakat atau partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan pemilihan/pemilu.

Rendahnya kesadaran untuk partisipasi dalam melakukan pengawasan pemilu/pemilihan berkorelasi dengan rendahnya laporan yang disampaikan masyarakat kepada pengawas pemilu terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu. Berdasarkan data dari Bawaslu.go.id tentang dugaan pelanggaran pemilu 2019 menyebutkan ada 24.528 dugaan pelanggaran pemilu terdiri dari 19.436 (79 persen) dugaan merupakan temuan dari perangkat Bawaslu, sedangkan 5.092 (21 persen) adalah laporan dari masyarakat. Melihat data tersebut proses dugaan pelanggaran pemilu yang diperoleh 79 persen adalah hasil temuan Bawaslu. Disisi lain keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu untuk mencegah pelanggaran masih rendah sekitar 21 persen(Puadi, 2020).

Sehubungan dengan hal diatas, sebagai tolak ukur dari partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu pada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dilihat dari catatan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam penanganan pelanggaran pemilu dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2019. Pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 di Kabupaten Buton Selatan berdasarkan laporan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

terdapat 14 kasus penanganan pelanggaran pemilu terdiri dari 10 kasus laporan pelanggaran pemilu yang dilayangkan kepada Bawaslu dan terdapat 4 kasus temuan Bawaslu dengan jenis pelanggaran 7 kasus pelanggaran pidana, 6 kasus jenis pelanggaran lainnya, 1 kasus pelanggaran administrasi dengan tindak lanjut penanganan pelanggaran 10 kasus dihentikan dan 5 kasus direkomendasikan kepada pihak yang berwenang.

Perhelatan pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 tidak ada laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan demikian pula pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 tidak ada kasus yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi di masyarakat. Lain halnya dengan temuan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri sebagai tugas pelaksanaan tugas yang ikut melibatkan sub sistim dibawahnya pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga TPS.

Berikut adalah tabel laporan dan temuan pelanggaran pemilihan Bupati Kabupaten Buton Selatan tahun 2017 dan pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Panwaslu Kabupaten Selatan serta pemilu tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.

Tabel 1 : Laporan dan Temuan Pelanggaran Pilbup 2017, Pilgub 2018 dan Pemilu 2019 dalam Penanganan Pelanggaran oleh Panwaslu/Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

No	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Penanganan Pelanggaran		Jenis Pelanggaran				Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran		Tindak Lanjut Rekomendasi	
		Laporan	Temuan	Pidana	Pemilihan Lainnya /Hukum Lainnya	Kode Etik	Administrasi	Dihentikan	Direkomendasikan	KASN/BUMN	Incracth
1	Pilbup 2017	10	4	7	6	0	1	10	5	2	1
2	Pilgub 2018	0	8	0	1	0	7	0	7	1	0
3	Pemilu 2019	0	9	5	1	1	2	4	3	1	1

Sumber: Buletin Bawaslu Edisi II Juli-Desember 2019

Dari tabel laporan dan temuan pada catatan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan diatas dilihat dari perbandingan antara laporan dan temuan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Buton Selatan dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan masih sangat rendah atau dapat dikatakan dalam penanganan pelanggaran seratus persen berasal dari temuan perangkat Bawaslu Kabupaten Buton Selatan. Fakta ini menjadi catatan bagi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terhadap kinerjanya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dan menjadi tugas yang cukup berat untuk mendorong signifikansi terhadap angka laporan masyarakat pada tahapan penyelenggaraan pemilu.

Komunikasi organisasi yang aktif kepada masyarakat sebagai bentuk komunikasi kepada khalayak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga Bawaslu dalam kaitannya dengan konteks pengawasan partisipatif di Kabupaten Buton Selatan.

Berdasarkan fakta-fakta penanganan pelanggaran yang sudah di paparkan sebelumnya, maka ada banyak pertanyaan yang mungkin saja timbul ditinjau dari sisi Ilmu komunikasi yakni bagaimana Bawaslu mengimplementasikan pengetahuan akan pelanggaran pemilu dan penanganannya, bagaimana komunikasi bawaslu kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat secara persuasif dalam meningkatkan pengawasan

partisipatif, bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipatif masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan dalam pemilu/pemilihan.

Berdasarkan berbagai uraian diatas maka, peneliti memiliki minat untuk melakukan penelitian tentang strategi Komunikasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang berdampak pada peningkatan laporan masyarakat kepada bawaslu atau peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat terhadap pelanggaran pemilu pada perhelatan Pemilihan Umum 2024 mendatang. Tentu saja menurut peneliti ini menjadi sebuah kajian yang menarik dalam Ilmu Komunikasi dan cukup fenomenal terkhusus bagi pengawas pemilu karena banyak diperbincangkan dan menjadi jurnal dan penelitian-penelitian dengan topik pengawasan partisipatif seperti yang penelitian yang dilakukan oleh (Rakhman, 2020) dan (Puadi, 2020) serta peneliti lainnya. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Komunikasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif”**

B. Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka membatasi penelitian ini yaitu hanya pada pendekatatan strategi komunikasi organisasi Bawaslu

Kabupaten Buton Selatan periode 2018 – 2023 dalam meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif.

2. Rumusan Masalah

Sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah peneliti berupaya untuk mengelaborasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan secara organisasi dalam menghasilkan keputusan atau langkah strategis yang dilaksanakan dalam rangka upaya untuk meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif yang juga merupakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Buton Selatan ditinjau dari sisi Ilmu komunikasi dan penerapan teori-teori komunikasi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan teori komunikasi organisasi dalam ilmu komunikasi terutama

strategi komunikasi organisasi Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan peneliti tentang Ilmu Komunikasi dan dapat melatih peneliti dalam kemampuan deskriptif serta menjadi motivasi dalam menganalisa permasalahan perihal komunikasi organisasi.

b. Bagi Lembaga

Bisa menjadi referensi ilmu komunikasi dalam lembaga Bawaslu Kabupaten Buton Selatan serta dapat menjadi referensi untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Buton di masa yang akan datang.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan informasi dalam bidang ilmu komunikasi terutama komunikasi organisasi serta pengetahuan tentang kelembagaan Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Penelitian terdahulu

Jurnal penelitian tentang strategi komunikasi organisasi telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya diantaranya (Satma & Putri, 2019) meneliti terkait Strategi Komunikasi KPU Kota Padang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Kada Tahun 2019. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang strategi komunikasi organisasi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas tentang partisipasi masyarakat tetapi dari persepsi yang berbeda karena dari persepsi KPU adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya pada saat hari pemilihan dilangsungkan sedangkan persepsi Bawaslu adalah peningkatan partisipasi masyarakat yang ikut berperan dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu/pemilihan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu.

Jurnal penelitian lain yang membahas tentang Strategi Komunikasi Organisasi adalah (Yulhardi, 2014) dengan judul Strategi Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru serta jurnal penelitian lainnya lagi adalah (Mulawarman & Rosilawati, 2014) dengan judul penelitian

Komunikasi Organisasi Pada Dinas Perijinan Kota Yogyakarta Untuk Meningkatkan Pelayanan.

Penelitian lain dalam bentuk skripsi yang meneliti tentang strategi komunikasi organisasi juga adalah (Yuli Patilata, 2013) dengan judul penelitian Strategi Komunikasi Organisasi Pengurus Pusat Front Pembela Islam (FPI) dalam membentuk militansi kader, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana Strategi Komunikasi Organisasi Pengurus Pusat Front Pembela Islam (FPI) dalam membentuk militansi kader? 2) Bagaimana bentuk komunikasi organisasi yang diterapkan pada pengurus Pusat FPI dalam membentuk militansi kader? Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian tentang strategi komunikasi organisasi dengan pendekatan teori yang relatif sama dengan peneliti dan yang membedakannya adalah fokus penelitian dimana penelitian ini berfokus pada komunikasi dengan internal organisasi untuk membentuk militansi kader sedangkan penelitian peneliti berhubungan dengan eksternal organisasi untuk meningkatkan perhatian masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Penelitian skripsi lainnya adalah (Situmorang, 2019) dengan judul Strategi Komunikasi Organisasi Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam melahirkan Kebijakan Pemberian Beasiswa MoU Bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Sumatra Utara Medan. Serta penelitian lainnya yakni (Wardana, 2020) dengan judul Strategi Humas Pemkot Kota Madiun dalam

Mensosialisasikan Program Kerja Pemerintah Melalui Media Sosial (Studi di PPID Dinas Kominfo Madiun)

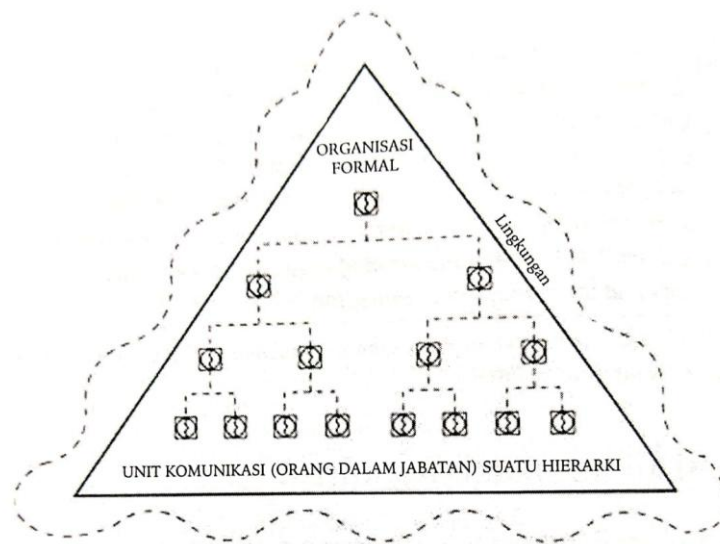
2. Komunikasi Organisasi

2.1. Definisi Komunikasi Organisasi

R. wayne Pace dan Don. Faules yang dialihbahasakan oleh Mulyana (2001:31-32) mengemukakan definisi fungsional komunikasi organisasi sebagai penunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi, dengan demikian, terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan (Poppy Ruliana, 2018).

Unit komunikasi organisasi adalah hubungan antara orang-orang dalam jabatan-jabatan (posisi-posisi) yang berada dalam organisasi tersebut. Unit dasar dalam komunikasi organisasi adalah seseorang dalam suatu jabatan. Posisi dalam jabatan menentukan komunikasi dalam jabatan-jabatan. Komunikasi timbul apabila satu orang menciptakan pesan lalu yang lain menafsirkan, menjadi sebuah “pertunjukan” dan menciptakan pesan baru. Gambar 2.1. ini melukiskan seseorang sebagai lingkaran yang berada dalam jabatan segi empat. Seperti yang dijelaskan Bekke dan Argyris (Pace dan Faules, 2006:32) orang tersebut disosialisasikan oleh jabatan tersebut, menciptakan suatu lingkaran yang lebih sesuai dengan keadaan jabatan tersebut, pada saat yang sama jabatan tersebut, pada saat yang sama jabatan tersebut dipersonalisasi,

menghasilkan suatu figure atau gambar yang sesuai dengan keadaan orang tersebut.



Gambar 1 Sistem Komunikasi Organisasi

Gambar diatas melukiskan konsep suatu sistem komunikasi organisasi. Garis yang terputus-putus melukiskan gagasan bahwa hubungan-hubungan ditentukan alih-alih bersifat alami; hubungan-hubungan itu juga menunjukkan bahwa struktur suatu organisasi bersifat luwes dan mungkin berubah sebagai respon terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan yang internal dan juga eksternal. Meskipun demikian hubungan antara jabatan-jabatan berubah secara resmi berdasarkan pernyataan pejabat-pejabat organisasi.

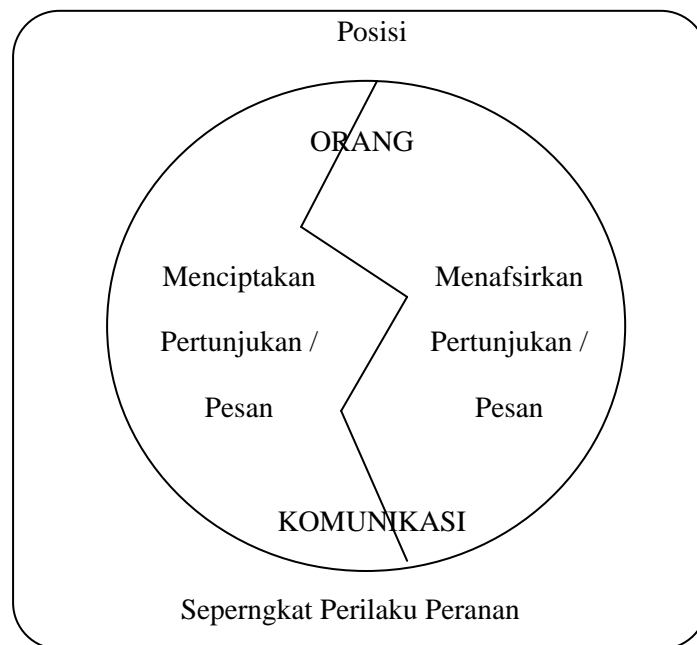
Jika melihat apa yang terjadi tatkala seseorang terlihat dalam komunikasi, kita menemukan bahwa terdapat dua bentuk umum tindakan yang terjadi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penciptaan pesan atau penciptaan “pertunjukan” [Anda membawa sesuatu untuk diperhatikan seseorang atau orang lain; menyebarkan

sesuatu hingga sesuatu tersebut dapat terlihat secara lengkap dan menyenangkan].

2. Penafsiran pesan atau penafsiran pertunjukan [menguraikan atau memahami sesuatu dengan cara tertentu]

Gambar 2 melukiskan kedua proses in dengan membagi orang yang berperilaku tersebut dengan garis bergerigi.



Gambar 2.2 Proses Komunikasi Organisasi

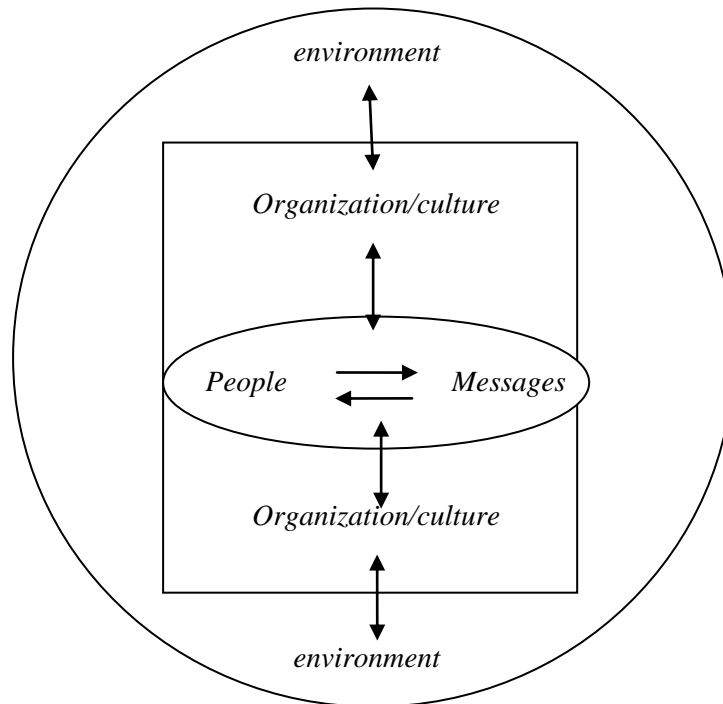
Secara teknis, seseorang tidak dapat menghindari untuk menunjukkan pesan. Apa yang Anda tujukan atau tempatkan sehingga jelas memang merepresenasikan Anda. Anda adalah “suatu pertunjukan pesan yang berjalan”. Hal yang sama dapat diterapkan kepada kantot atau hotel Anda. Kantor atau hotel adalah suatu pertunjukan pesan bagi mereka yang datang (Pace dan Faules, 2006:45).

Goldhaber (1993: 14-15) juga mengemukakan bahwa komunikasi organisasi dapat didefinisikan dan dipersepsikan dari pelbagai perspektif seperti yang dikemukakan berikut ini:

Tabel 2. Perspektif komunikasi organisasi

1.	<i>Organization communication occurs within a complex open system which is influenced by its environment, both internal (called culture) and external</i>	Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh dan lingkungannya, baik internal (disebut budaya) dan eskternal.
2.	<i>Organization communication involves message and their flow, purpose, direction, and media</i>	Komunikasi organisasi melibatkan pesan dan saluran, arah, tujuan dan media
3.	<i>Organization communication involves people and their attitudes, feelings, relationship, and skills</i>	Komunikasi organisasi melibatkan orang-orang dan sikap mereka, perasaan, dan keterampilan.
4.	<i>Organization communication is the process of creating and exchanging message within a network of interdependent relationship to cope with environmental uncertainty.</i>	Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang

		tidak pasti atau selalu berubah- ubah
--	--	--



Gambar 3 Paradigma komunikasi organisasi

Dari definisi yang dikemukakan oleh Golhaber tersebut, ada tujuh konsep kunci yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Proses (*Process*)

Suatu organisasi adalah satuan sistem terbuka yang dinamis menciptakan dan saling menukar pesan di antara anggotanya. Karena gejala menciptakan dan menukar informasi ini berjalan terus menerus dan tidak ada henti-hentinya, maka dikatakan suatu proses.

2. Pesan (*Message*)

Yang dimaksud dengan pesan adalah susunan symbol yang penuh arti tentang orang, objek, dan kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang lain. Untuk berkomunikasi, seseorang harus sanggup menyusun suatu gambaran mental, member gambaran itu nama dan mengembangkan suatu perasaan terhadapnya. Komunikasi tersebut efektif jika pesan yang dikirimkan itu diartikan sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si pengirim. Dalam komunikasi organisasi kita mempelajari ciptaan dan pertukaran pesan dalam seluruh organisasi.

3. Jaringan (*Network*)

Dalam suatu organisai terdapat orang-orang yang menduduki posisi atau peranan tertentu dalam organisasi. Ciptaan dan pertukaran pesan dari orang-orang ini terjadi melalui suatu set jalan kecil yang dinamakan jaringan komunikasi. Suatu jaringan komunikasi ini mungkin hanya mencakup dua orang, beberapa orang atau keseluruhan organisasi. Hakikat dan luas jaringan ini dipengaruhi oleh banyak factor, antara lain: hubungan peranan, arah dan arus pesan, hakikat seri dari arus pesan dan isi pesan.

4. Keadaan saling tergantung (*Interdependence*)

Konsep kunci komunikasi organisasi lainnya adalah keadaan yang saling tergantung satu bagian dengan bagian lainnya. Hal ini telah menjadi sifat dari suatu organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka. Bila suatu bagian dari suatu organisasi mengalami gangguan

maka akan berpengaruh pada bagian lainnya dan mungkin juga seluruh sistem organisasi. Begitu juga halnya dengan jaringan komunikasi dalam suatu organisasi akan saling melengkapi. Implikasinya, bila pimpinan membuat suatu keputusan maka dia harus memperhitungkan implikasi keputusan ini terhadap organisasi menyeluruh.

5. Hubungan (*Relationship*)

Organisasi merupakan suatu sistem terbuka, sistem kehidupan sosial, maka untuk berfungsinya bagian-bagian itu terletak pada tangan manusia. Dengan kata lain, jaringan (pesan) dalam suatu organisasi dihubungkan oleh manusia. Oleh karena itu, hubungan manusia dalam organisasi menjadi penting. Hubungan manusia dalam organisasi berkisar mulai dari yang sederhana yaitu hubungan antara dua orang (diadik) sampai kepada hubungan dalam kelompok-kelompok kecil, maupun besar dalam organisasi.

6. Lingkungan (*environment*)

Lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan factor sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Lingkungan ini dapat dibedakan atas lingkungan internal adalah personalia (karyawan), golongan fungsional dari organisasi dan komponen organisasi lainnya seperti tujuan, produk, jasa dan sebagainya. Lingkungan eksternal adalah para pelanggan, konsumen, leveransir, pesaing dan teknologi.

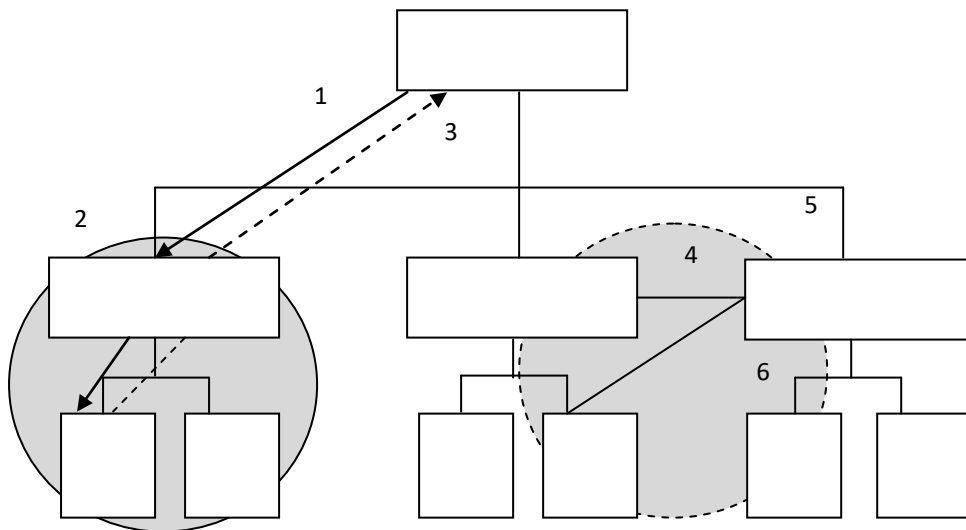
7. Ketidakpastian (*Uncertainty*)

Ketidak pastian adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan. Misalnya suatu organisasi memerlukan informasi perihal aturan pemerintah yang berpengaruh terhadap produksi barang-barangnya (Muhammad, 1999:67-74) dalam (Poppy Ruliana, 2018).

2.2. Komponen Komunikasi Organisasi

Dalam proses komunikasi organisasi ada beberapa komponen yang penting untuk diperhatikan. Adapun komponennya sebagai berikut:

1. Jalur komunikasi internal, eksternal, atas-bawah, bawah-atas, horizontal serta jaringan.



Gambar 4 Komunikasi Organisasi Berdasarkan Struktur Organisasi

Sumber : Alo Liliweri, 2013:370 dalam (Poppy Ruliana, 2018)

Keterangan:

1. Garis Komando – komunikasi vertical (hubungan antara atasan dan bawahan)
2. Satu unit kerja dengan tugas dan fungsi sejenis

3. Garis tanggung jawab komunikasi vertical (atasan dan bawahan)
4. Komunikasi Horizontal (hubungan antara dua pejabat yang mempunyai posisi/level yang sama)
5. Satu unit klik (unit informal yang terbentuk oleh hubungan diantara beberapa orang dari level posisi yang berbeda.
6. Komunikasi diagonal (hubungan antara dua pejabat yang berasal dari unit kerja yang berbeda dan mempunyai level/posisi yang berbeda)

Gambar 2.4 memperlihatkan bagaimana proses komunikasi organisasi dengan garis komando, tanggung jawab komunikasi yang horizontal dan diagonal untuk mengakomodasikan hubungan antara pekerjaan yang secara fungsional memerlukan koordinasi. Dalam praktik organisasi, dikenal pula dua bentuk jaringan, yakni jaringan formal dan informal.

2. Induksi, antara lain orientasi tersembunyi dari para karyawan kebijakan dan prosedur, serta keuntungan para karyawan.
3. Saluran, antara lain media elektronik (email,internet), media cetak (memo, surat-menyurat, bulletin) dan tatap muka.
4. Rapat antara lain briefing, rapat staf, rapat proyek, dan dengar pendapat umum.
5. Wawancara, antara lain seleksi, tampilan kerja dan promosi karier.

Ada lima penggolongan komunikasi dalam organisasi yang dapat dipakai, yaitu :

1. Komunikasi lisan dan tertulis

Dari penggolongan komunikasi lisan dan tertulis ini adalah bentuk pesan yang akan disampaikan. Keuntungan terbesar dari komunikasi lisan adalah kecepatannya, artinya ketika orang melakukan tindak komunikasi dengan orang lain, pesan dapat disampaikan dengan segera. Keuntungan

kedua adalah munculnya umpan balik yang segera dan keuntungan yang ketiga adalah memberi kesempatan kepada pengirim pesan untuk mengendalikan situasi. Jika orang memiliki kemampuan berbicara yang baik, memungkinkan pesan-pesan yang disampaikan akan menjadi lebih jelas dan cukup efektif dapat diterima oleh *receiver*.

Pada komunikasi tertulis, keuntungannya adalah bahwa ia bersifat permanen, karena pesan-pesan organisasional yang disampaikan dilakukan secara tertulis. Selain itu, catatan-catatan tertulis juga mencegah orang untuk melakukan penyimpangan terhadap gagasan-gagasan yang orang sampaikan.

2. Komunikasi Verbal dan Non Verbal

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan bahasa secara lisan, sedangkan komunikasi non verbal adalah komunikasi tanpa kata atau komunikasi yang menggunakan isyarat.

3. Komunikasi Horizontal dan Komunikasi Vertikal

Penggolongan komunikasi ini didasarkan pada arah aliran atau arus komunikasi dalam suatu organisasi dengan tujuan menyampaikan pesan atau informasi.

- a. Komunikasi Horizontal merupakan tindak komunikasi yang berlangsung diantara sesama anggota yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsi arus komunikasi horintal ini adalah memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya memecahkan konflik; membina hubungan melalui kegiatan bersama.

- b. Komunikasi Vertikal terdiri dari upward communication dan downward communication. Upward communication terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya yang berupa penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan, penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan bawahan, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan dan penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Downward communication merupakan komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya yang berupa pemberian atau penyampaian intruksi kerja, penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan, penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, dan memberikan motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik
- c. Komunikasi Diagonal merupakan komunikasi dalam organisasi antara seseorang dengan lainnya yang satu sama lain berbeda dalam kedudukan dan unitnya. Komunikasi diagonal tidak menunjukkan kekakuan sebagaimana dalam komunikasi vertikal, tetapi tidak juga menunjukkan keakraban sebagaimana dalam komunikasi horizontal. Dalam hal komunikasi diagonal kadang terjadi menyimpang dari jalur prosedur birokrasi, misal seorang

pegawai suatu unit mengeluhkan masalah pekerjaan kepada unit lain.

4. Komunikasi Formal dan Informal

Komunikasi dalam organisasi juga dapat digolongkan menjadi komunikasi organisasi formal dan informal. Komunikasi organisasi formal merupakan proses komunikasi yang mengikuti jalur hubungan formal yang tergambar dalam susunan atau struktur organisasi. Komunikasi informal adalah proses komunikasi dimana arus informasinya sesuai dengan kepentingan dan kehendak masing-masing pribadi yang ada dalam organisasi tersebut.

5. Komunikasi Satu Arah dan Dua Arah

Jenis komunikasi satu arah ini menghilangkan kesempatan untuk memperoleh kejelasan dan konfirmasi, jenis komunikasi ini hanya menekankan penyampaian pesan. Komunikasi satu arah cepat penyampaiannya, dan menghemat waktu dan biaya. Pada komunikasi ini komunikan tidak mempunyai kesempatan untuk mempertanyakan informasi yang dikirimkan sehingga dapat melindungi atau menutupi kesalahan yang mungkin dilakukan sehingga komunikan dibiarkan dalam keadaan ketidakjelasan.

Komunikasi dua arah mempunyai suatu system umpan balik yang terpasang tetap di dalamnya, yang memungkinkan komunikator dapat memperoleh umpan balik pesan yang disampaikan. Jenis komunikasi ini menjamin informasi dan penjelasan lebih lanjut akan

diberikan dan tersedia setiap saat jika dibutuhkan. Namun, komunikasi ini berjalan lambat karena memakan waktu dan kemungkinan kurang efisien karena dapat memberikan kepuasan yang berlebihan kepada penerima pesan yang mempunyai kesempatan untuk memahami pesan yang dikirim sepenuhnya. (Masmuh, 2010 dalam Romli).

2.3. Tujuan Komunikasi Organisasi

Tujuan Komunikasi organisasi adalah untuk memudahkan, dan melancarkan jalannya organisasi. Menurut Koontz (dalam Mukjizat, 1993:15-16), dalam arti yang lebih luas tujuan komunikasi organisasi adalah untuk mengadakan perubahan dan untuk mempengaruhi tindakan kearah kesejahteraan perusahaan. Sementara itu Liliweri (2013:372-373) mengemukakan bahwa ada 4 tujuan komunikasi organisasi (Poppy Ruliana, 2018), yakni:

1. Menyatakan pikiran, pandangan dan pendapat
2. Membagi informasi
3. Menyatakan perasaan dan emosi
4. Melakukan koordinasi

Pentingnya komunikasi dalam organisasi dapat diperhatikan dari ilustrasi berikut. Misalnya sebuah hotel memerlukan sebuah informasi, baik tentang harga, persaingan teknologi dan keuangan maupun informasi tentang siklus perusahaan dan kegiatan pemerintah. Pengetahuan ini merupakan dasar bagi keputusan-keputusan yang mempengaruhi garis produk, rasio produk, mutu, sisasat pemasaran, gabungan factor-faktor

produktif dan arus informasi internal. Akan tetapi pemahaman tentang informasi dan tindakan sebagai tanggapan terhadapnya menjadi sangat sulit apalagi dalam suatu perusahaan besar yang mempunyai karyawan yang banyak.

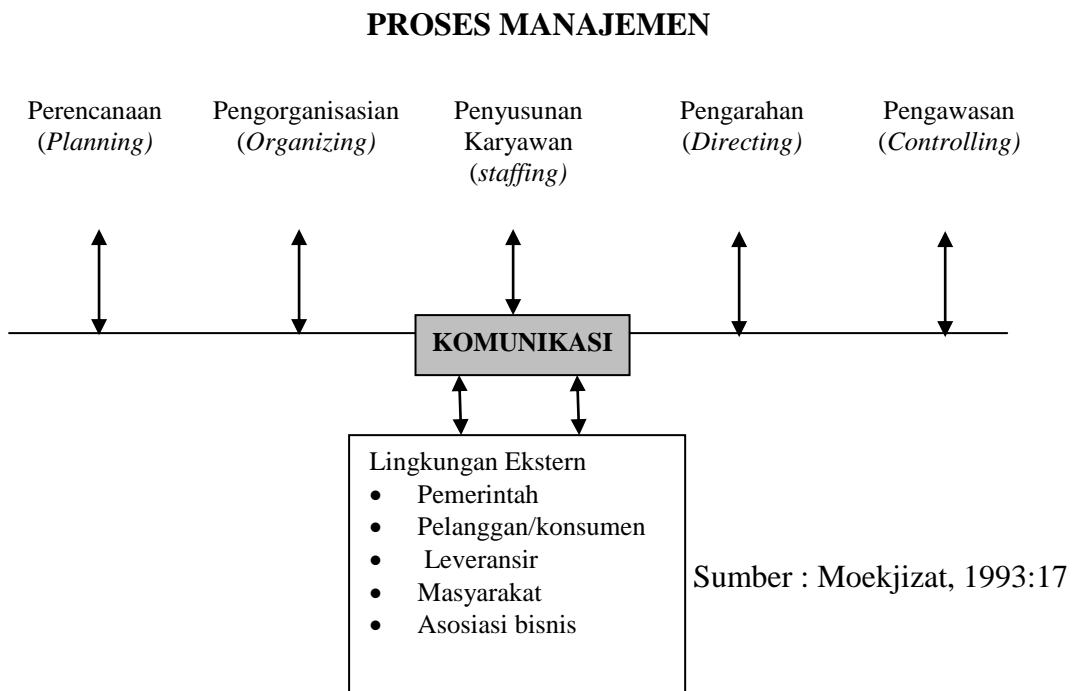
Dari situlah dapat dipahami pentingnya komunikasi. Komunikasi adalah penting untuk berfungsinya internal perusahaan. Karena itu menurut Harol Koontz (Mukjizat, 1993:15-16) bahwa komunikasi menyatukan fungsi-fungsi manajerial, dan komunikasi diperlukan untuk:

1. Menentukan dan menyebarkan tujuan perusahaan.
2. Mengembangkan rencana guna pencapaiannya.
3. Mengatur sumber daya manusia dan sumber daya-sumber daya lainnya dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin.
4. Memilih, mengembangkan dan menilai anggota-anggota organisasi.
5. Memimpin, mengarahkan, memotivasi dan menciptakan suatu suasana dimana orang-orang mau memberikan sumbangan.
6. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Gambar berikut menunjukkan secara grafis bahwa komunikasi itu tidakhanya memudahkan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, penyusunan tenaga kerja, kepemimpinan dan pengawasan, tetapi juga menghubungkan organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Melalui pertukaran informasi, manajer-manajer menjadi sadar akan kebutuhan para pelanggan, tersedianya leveransir-leveransir

tuntutan para pemegang saham, peraturan-peraturan pemerintah dan perhatian masyarakat.

Gambar 5. Tujuan dan Fungsi Komunikasi



Dari gambar diatas jelas terlihat bahwa organisasi tanpa komunikasi tidak akan berfungsi dan berjalan dengan baik. Fungsi manajerial yang ditentukan oleh perusahaan harus dikomunikasikan sehingga seluruh karyawan mengetahui kebijakan yang diambil oleh top manajemen (pimpinan organisasi) dan banyak cara pula untuk berkomunikasi baik dengan publik internal maupun publik eskternal yang itu tergantung pada pimpinan organisasi dan publik atau khalayak yang dituju sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik.

2.4. Fungsi Komunikasi Organisasi

Menurut Liliweri (2014:373-374) dalam (Poppy Ruliana, 2018), ada dua fungsi komunikasi organisasi yaitu yang bersifat umum dan khusus. Di bawah ini akan dijabarkan dua fungsi tersebut.

1. Fungsi Umum

- a. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan atau memberikan informasi kepada individu atau kelompok tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Contoh: *deskripsi pekerjaan (job description)*.
- b. Komunikasi berfungsi untuk menjual gagasan dan ide, pendapat dan fakta. Termasuk juga menjual sikap organisasi dan sikap tentang sesuatu yang merupakan subyek layanan. Contoh: *public relations*, pameran, eskpo, dan lain-lain.
- c. Komunikasi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan para karyawan, agar mereka bisa belajar dari orang lain (internal), belajar tentang apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dikerjakan orang lain tentang apa yang “dijual” atau yang diceritakan orang lain tentang organisasi.
- d. Komunikasi berfungsi untuk menentukan apa dan bagaimana organisasi membagi pekerjaan atau siapa yang menjadi atasan dan siapa yang menjadi bawahan, dan besaran kekuasaan dan kewenangan, serta menentukan bagaimana menangani sejumlah orang, bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia, dan mengalokasikan manusia, mesin, metode dan teknik dalam organisasi.

2. Fungsi khusus

- a. Membuat para karyawan melibatkan diri kedalam isu-isu organisasi lalu menerjemahkannya kedalam tindakan tertentu dibawah sebuah komando atau perintah.

- b. Membuat para karyawan menciptakan dan menangani relasi antarsesama bagi peningkatan produk organisasi.
- c. Membuat para karyawan memiliki kemampuan untuk menanganidan mengambil keputusan-keputusan dalam suasana yang ambigu dan tidak pasti.

Sehubungan dengan fungsi komunikasi organisasi diatas, Charles Conrad (1985) dalam (Poppy Ruliana, 2018) juga menyatakan ada dua fungsi komando dan fungsi relasi yang mendukung organisasi dalam pengambilan keputusan, terutama ketika organisasi menghadapi situasi yang kurang menentu. Untuk lebih memahami bagaimana fungsi komando dan fungsi relasi tersebut dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3 : Fungsi Komunikasi Organisasi

Fungsi Komando	Fungsi Relasi
<ul style="list-style-type: none"> • Mengarahkan dan membatasi tindakan. • Menangani dan memelihara tampilan yang dekat melalui umpan balik • Menggunakan publikasi dan instruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan dan melanjutkan sifat impresional dalam organisasi. • Membuat koordinasi antarunit kegiatan • Menentukan dan mendefinisikan peran organisasi
Fungsi komunikasi untuk Mengambil keputusan dalam Suasana yang Ambigu dan Tidak Pasti	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga keseimbangan antara kepentingan organisasi dengan kepentingan individual 2. Mengelola pelbagai akibat yang ditinggalkan atau memelihara tradisi organisasi. 3. Menciptakan perspektif bagi peluang pembagian pengalaman kerja. 	

Sumber : Charles Conrad (dalam Liliweri, 2014:374)

Pendapat lain tentang fungsi komunikasi organisasi adalah Menurut Sendjaja (Burhan. 2011:278), organisasi baik yang berorientasi untuk mencari keuntungan (profit) maupun nirlaba (non-profit), memiliki empat fungsi organisasi, yaitu: fungsi informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Keempat fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Fungsi informative

Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem proses informasi (information-processing system). Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan karyawan (bawahan) membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan, disamping itu juga informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti dan sebagainya.

2) Fungsi regulative

Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. Pertama,

atasan atau orang-orang yang berada dalam tatanan manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Disamping itu, mereka juga mempunyai kewenangan untuk memberi instruksi atau perintah, sehingga dalam struktur organisasi kemungkinan mereka ditempatkan pada lapis atas (*position of authority*) supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun demikian, sikap bawahan untuk menjalankan perintah banyak bergantung pada :

- a) Keabsahan pimpinan dalam menyampaikan perintah
- b) Kekuatan pimpinan dalam memberi sanksi
- c) Kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang pimpinan sekaligus sebagai pribadi.
- d) Tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan

Kedua, berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh untuk dilaksanakan

3) Fungsi persuasif

Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk memersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan

kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya.

4) Fungsi integrative

Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi formal, seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut (newsletter, bulletin) dan laporan kemajuan organisasi; juga saluran komunikasi informal, seperti perbincangan antarpribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas ini menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi.

2.5. Saluran Komunikasi Organisasi

Saluran komunikasi organisasi adalah alat yang digunakan komunikator untuk menyebarluaskan (mendistribusikan) suatu pesan dengan tujuan memperoleh respons atau timbale balik. Saluran komunikasi ini terdiri dari saluran interpersonal dan saluran massa. Saluran interpersonal dapat bersifat langsung seperti komunikasi tatap muka dan saluran tidak langsung, seperti telepon, SMS, BBM, Line, Whatsapp dan sebagainya. Saluran massa yaitu media massa, berupa media cetak dan elektronik. Masing-masing media ini memiliki pengaruh

yang berbeda, tergantung pada tujuan komunikasi yang hendak dicapai oleh organisasi (Poppy Ruliana, 2018).

Brent dan Stewart merangkum saluran komunikasi organisasi dengan mengutip sebagian dari pendapat R. Wayne Pace (1983) beberapa diantaranya sebagai berikut: (Ruben, 2013)

Memo	Selentingan atau Gosip
Telepon	Video Satelit
Laporan berkala	kuliah
E-mail	buku petunjuk
Makan siang bisnis	bulletin
Presentasi Video	Video Striming Internet
Sesi pelatihan	Buku Data Pegawai
Konferensi	Pembicara tamu
Pidato	Laporan temuan
Sistem pengiriman pesan	Pamflet Pengumuman
Rapat	Rincian pesan psikotest
Curhat	DVD
Tamasya atau acara keluarga	Bagan dan Grafik
Lokakarya	Poster
Mengandalkan Iklan	Kotak Saran
Pameran dan Pertunjukan	Konferensi Jarak Jauh
Lembaran Presentasi	Komite
Kontak Antar Pribadi sehari-hari	Pertemuan Sosial
Faksimili	Wawancara konsultasi

Kotak 1. Contoh Saluran Komunikasi Organisasi

2.6. Hambatan dalam Komunikasi Organisasi

Ada lima hambatan atau gangguan komunikasi yang kerap muncul dalam komunikasi organisasi menurut Warren R. Plunket dan Raymond F. Atner (1986) (Rudi, 2005:4)(Poppy Ruliana, 2018). Kelima hambatan tersebut disajikan di dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4 : Hambatan komunikasi organisasi

1. <i>Management level</i> (tingkatan manajemen)	Dalam organisasi terdapat peringkat manajemen yaitu <i>top, upper, middle,</i> dan <i>lower management</i> dan dalam tingkatan manajemen tersebut dapat saja terjadi penyampaian pesan/informasi yang tidak sepenuhnya berlangsung dengan lancar, baik ditinjau dari arah atau aliran informasi atau pola komunikasi, baik secara <i>top down</i> maupun secara <i>bottom up</i> .
2. <i>Number of people supervised</i> (jumlah staf yang berada dalam kendali atau dibawah pengawasan)	Jika staf atau karyawan yang langsung dibawah pengawasan seorang pimpinan kurang dari 12 orang, maka komunikasi mengenai bidang tugas atau pekerjaannya lebih lancar. Sebaliknya, jika staf yang di bawah komandonya lebih 12 orang maka kecenderungannya

	komunikasi akan lambat.
3. <i>The rank of position in the organization</i> (jenjang kepangkatan, jabatan, dan status atau kedudukan di dalam organisasi)	Jika jenjang kepangkatan, jabatan, dan status atau kedudukan di dalam organisasi terlalu jauh, maka komunikasi yang terjadi kurang lancar dan kaku.
4. <i>Change in manager</i> (pergantian manajer)	Perubahan atau penggantian manajer atau perubahan dalam pola komunikasi dari atasan ke bawahan.
5. <i>Manager interpretation</i>	Masing-masing manajer memiliki pola pikir, cara menafsirkan dan pola hubungan yang berbeda terhadap para karyawan. Misalnya, ada manajer yang suka terhadap karyawan walaupun pekerjaannya kurang baik asalkan karyawan tersebut pandai bersikap Asal Bapak Senang. Tetapi ada juga manajer yang suka terhadap sikap karyawan yang cuek atau urakan tetapi hasil kerjanya bagus dan memuaskan.

Hambatan dan gangguan berkomunikasi merupakan pengaruh dari “dalam” dan “luar” individu dan lingkungan yang “merusak aliran

informasi atau isi pesan yang dikirimkan atau diterima. Untuk memecahkan masalah hambatan tersebut seperti diatas, berikut ini diuraikan cara mengatasi hambatan komunikasi dalam organisasi menurut Bovee dan Thill (dalam Sutrisna Dewi, 2006:18). Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memelihara iklim komunikasi terbuka
2. Bertekad memegang teguh etika berkomunikasi.
3. Memahami kesulitan komunikasi antarbudaya
4. Menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima.
5. Menggunakan teknologi secara bijaksana
6. Menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Memahami penerima pesan
 - b. Menyesuaikan pesan dengan penerima
 - c. Mengembangkan dan menghubungkan gagasan
 - d. Mengurangi jumlah pesan
 - e. Memilih saluran atau media komunikasi yang tepat.
 - f. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi
7. Memberikan umpan balik (*feedback*) secara cepat.

3. Strategi Komunikasi Organisasi

3.1. Tinjauan tentang Strategi Komunikasi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "*stratus*" yang artinya tentara dan kata "*agein*" yang berarti memimpin. Dengan demikian strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata *strategos* yang

artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer yang diartikan seni perang para jenderal (*The Art of General*), atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan. Dalam strategi ada prinsip yang harus dicamkan, yakni “Tidak ada sesuatu yang berarti dari segalanya kecuali mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh musuh, sebelum mereka mengerjakannya”(Cangara, 2017)

Karl Von Clausewitz (1780-1831) seorang pensiunan jenderal Prusia dalam bukunya *On War* merumuskan strategi ialah “suatu seni menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang”. Martin – Anderson (1968) juga merumuskan “Strategi adalah seni dimana melibatkan kemampuan intelegensi/pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien

Strategi menghasilkan gagasan dan konsepsi yang dikembangkan oleh para praktisi. Karena itu para pakar strategi tidak saja lahir dari kalangan yang memiliki latar belakang militer, tapi juga dari profesi lain, misalnya pakar strategi Henry Kissinger berlatar belakang sejarah, Thomas Schelling berlatar belakang ekonomi, dan Albert Wohlfarth berlatar belakang matematika.

Dalam menangani masalah komunikasi, para perencana dihadapkan pada sejumlah persoalan, terutama dalam kaitannya dengan strategi penggunaan sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Rogers (1982) member batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah

laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton (1980) membuat definisi dengan menyatakan “Strategi Komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.

Pemilihan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi, sebab jika pemilihan strategi salah satu keliru maka hasil yang diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, materi dan tenaga. Oleh karena itu strategi juga merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh para perencana.

Keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh penentuan strategi komunikasi. Dalam buku berjudul “Dimensi-Dimensi Komunikasi” Onong Uchjana Effendi menyatakan bahwa :

“strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara teknis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi (Effendy, 2015)

Strategi komunikasi menurut Onong Uchjana Effendy sebagai berikut:

“strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara teknis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi. Strategi komunikasi merupakan penentu berhasil tidaknya kegiatan komunikasi berupa pesan yang disampaikan melalui berbagai media dapat secara efektif diterima.

Dengan demikian, strategi komunikasi, baik secara makro (*flamed multi media strategy*) maupun secara mikro (*single communication medium strategy*) mempunyai fungsi ganda” (Effendy, 2015)

Dari pendapat Onong Uchjana Effendy diatas, terlihat bahwa dalam pelaksanaan sebuah strartegi komunikasi tidak terlepas dari Tujuan, Rencana dan Manajemen komunikasi yang didalamnya terdapat kegiatan, pesan dan media. Bawaslu Kabupaten Butom Selatan dalam tujuannya untuk meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif terlebih dahulu diawali dengan perencanaan dengan melibatkan manajemen komunikasi untuk melakukan kegiatan serta penggunaan media sebagai tindak lanjut atau operasional dari rencana yang dilakukan.

3.2. Tujuan Strategi Komunikasi

R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam buku mereka, *Techniques for Effective Communication*, sebagaimana dikutip oleh Effendy, menyatakan bahwa strategi komunikasi memiliki tiga tujuan utama, yaitu :

- a. Untuk mengamankan pemahaman (*to secure understanding*).
- b. Untuk menetapkan penerimaan (*to establish acceptance*)
- c. Untuk memotivasi tindakan (*to motivate action*)(Effendy, 2015)

Strategi komunikasi pada dasarnya adalah Perencanaan dan Manajemen untuk mencapai suatu tujuan, pemahaman yang sudah didapat harus diamankan menjadi suatu pemikiran yang sudah ditetapkan untuk memotivasi tindakan.

3.3.Fungsi Strategi Komunikasi

Menurut Onong Uchana Effendy, sebuah strategi, baik secara garis besar (makro) atau secara garis kecil (mikro), memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal.
2. Menjembatani jarak perbedaan budaya, akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya (Effendy, 2015).

3.4.Tahapan Strategi Komunikasi

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, dalam proses strategi komunikasi terdapat beberapa proses diantaranya:

1. Perumusan strategi

Dalam perumusan strategi, konseptor harus mempertimbangkan mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan dan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Perumusan strategi berusaha menemukan masalah-masalah yang terjadi dari peristiwa yang ditafsirkan berdasarkan konteks kekuatan kemudian mengadakan analisis mengenai kemungkinan-kemungkinan serta memperhitungkan

pilihan-pilihan dan langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka gerak menuju kepada tujuan itu (Ali Murtopo, 1978).

2. Implementasi Strategi

Setelah merumuskan dan memilih strategi yang ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang dilaksanakan tersebut. Dalam tahapan pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi. Dalam pelaksanaan organisasi yang tidak menerapkan komitmen dan kerja sama dalam pelaksanaan strategi, maka proses formulasi dan analisis strategi hanya akan menjadi impian yang jauh dari kenyataan. Implementasi strategi bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian sumber daya yang ditampakkan melalui penetapan struktur organisasi dan mekanisme kepemimpinan yang dijalankan bersama budaya perusahaan dan organisasi (David, 2002).

3. Evaluasi Strategi

Tahap akhir dari menyusun strategi adalah evaluasi implementasi strategi, evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang dapat dicapai dan dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk menentukan sasaran yang telah dicapai (David, 2002).

Ada tiga macam langkah dasar untuk mengevaluasi strategi, yaitu:

1. Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi. Adanya perubahan yang akan menjadi satu hambatan dalam pencapaian tujuan, begitupula dengan factor internal yang diantaranya strategi tidak efektif atau hasil implementasi yang buruk dapat berakibat buruk pula bagi hasil yang akan dicapai.
2. Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang dicapai dengan kenyataan). Prosesnya dapat dilakukan dengan menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi prestasi individual dan menyimak kemajuan yang dibuat kearah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Kriteria untuk mengevaluasi strategi harus mudah diukur dan mudah dibuktikan, kriteria yang meramalkan hasil lebih penting daripada kriteria yang mengungkapkan apa yang terjadi.
3. Mengembalikan tindakan *korektif* untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana. Dalam hal ini tidak harus berarti yang ada ditinggalkan atau merumuskan strategi baru. Tindakan korektif diperlukan bila tindakan atau hasil tidak sesuai dengan hasil yang dibayangkan semula atau pencapaian yang diharapkan(David, 2002).

3.5.Faktor Penting dalam Strategi Komunikasi

Dalam komunikasi, untuk menyusun strategi komunikasi ada empat faktor yang diperhatikan.

Pertama, mengenal khalayak merupakan langkah pertama bagi komunikator dalam usaha menciptakan komunikasi yang efektif. Mengingat dalam proses komunikasi, khalayak itu sama sekali tidak

pasif, melainkan aktif. Sehingga antara komunikator dengan komunikan bukan saja terjadi saling hubungan, tetapi juga saling mempengaruhi.

Kedua, menyusun pesan yaitu menentukan tema dan materi. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut ialah mampu membangkitkan perhatian. Perhatian adalah pengamatan terpusat, karena tidak semua yang diamati dapat menimbulkan perhatian. Dengan demikian awal dari efektivitas dalam komunikasi ialah bangkitnya dari perhatian khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan (M. Bachri Ghazali, 1997).

Hal ini sesuai dengan *procedure* atau *from attention to action procedure*. Artinya membangkitkan perhatian (*Attention*) untuk selanjutnya menggerakkan seseorang atau orang banyak melakukan kegiatan (*Action*) sesuai tujuan yang dirumuskan. Dalam menentukan tema atau isi pesan yang dilontarkan kepada khalayak sesuai dengan kondisinya, dapat bersifat: *on side issue*, suatu penyajian masalah yang bersifat sepihak, hanya segi positif atau hanya segi negatif saja. *Both side issues* suatu permasalahan yang disajikan baik segi negatif maupun segi positifnya.

Ketiga menetapkan metoda, dalam hal ini metode penyampaian dapat di lihat dari dua aspek yaitu: menurut cara pelaksanaannya dan menurut dan menurut bentuk isinya. Menurut cara pelaksanaannya dapat diwujudkan kedalam dua bentuk, metode

redundancy(repetition) dan *canalizing*. Sedangkan yang kedua untuk bentuk isinya dikenal metode-metode: informatif, persuasif, edukatif dan kursif.

- a. Metode *redundancy* adalah cara mempengaruhi khalayak dengan cara mengulang-ulang pesan pada khalayak. Metode *canalizing* yaitu mempengaruhi khalayak untuk menerima pesan yang disampaikan, kemudian secara perlahan-lahan merubah sikap dan pola pemikirannya kearah yang kita kehendaki.
- b. Sedangkan metode informatif lebih ditujukan pada penggunaan akal pikiran khalayak, dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa: keterangan, penerangan, berita dan sebagainya. Metode persuasif yaitu mempengaruhi khalayak dengan jalan membujuk. Dalam hal ini khalayak digugah baik pikiran maupun perasaannya. Metode edukatif memberikan sesuatu ide kepada khalayak berdasarkan fakta-fakta, pendapat dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kebenarannya dengan disengaja, teratur dan berencana dengan tujuan mengubah tingkah laku manusia kearah yang diinginkan. Metode kursif, mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa tanpa member kesempatan berpikir untuk menerima gagasan-gagasan yang dilontarkan,

dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan, intimidasi dan biasa dibelakangnya berdiri kekuatan tangguh.

Keempat, yaitu pemilihan media komunikasi karena untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat memilih salah satu atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan disampaikan dan teknik yang akan dipergunakan, karena masing-masing medium mempunyai kelemahan-kelemahannya tersendiri sebagai alat.

3.6.Korelasi Antar komponen dalam Strategi Komunikasi

Dalam strategi komunikasi perlu diperhatikan komponen-komponen komunikasi dan factor-faktor pendukung dan penghambat pada setiap komponen tersebut, secara berturut-turut dimulai dari komunikan sebagai sasaran komunikasi, media, pesan dan komunikator(Effendy, 2015).

a. Mengenali sasaran komunikasi

Sebelum kita melancarkan komunikasi, kita perlu mempelajari siapa-siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi kita itu. Sudah tentu ini bergantung pada tujuan komunikasi, apakah komunikan hanya sekedar mengetahui (dengan metode informatif) atau agar komunikan melakukan tindakan tertentu (metode persuasif atau instruksif). Apa tujuannya, metodenya dan banyaknya sasaran, pada diri komunikan perlu diperhatikan factor-faktor : 1) **factor kerangka referensi**, bahwa pesan yang disampaikan kepada komunikan harus disesuaikan dengan kerangka referensi (*frame of reference*)-nya.

Kerangka referensi seseorang berbeda dengan orang lain. Ada yang berbeda secara eksterm seperti antara murid SD dengan seorang mahasiswa atau seorang petani dengan diplomat. Ada perbedaan gradual saja seperti seorang perwira dengan seorang perwira lain yang sama-sama lulusan Akabri. Dalam situasi komunikasi antarpersona mudah mengenal kerangka referensi komunikasi karena ia hanya satu orang. Jangankan sudah dikenal tidak dikenal pun mudah menjajaginya, umpamanya dengan menanyakan kepadanya mengenai pekerjaan dan asal daerahnya.2) **factor situasi dan kondisi.** Yang dimaksud dengan situasi dan kondisi disini ialah situasi komunikasi pada saat komunikasi akan menerima pesan yang akan kita sampaikan. Situasi yang dapat menghambat jalannya komunikasi dapat di duga sebelumnya, dapat juga datang tiba-tiba pada saat komunikasi dilancarkan. Yang dapat diduga sebelumnya umpamanya mengadakan rapat dengan para karyawan pada waktu gajian atau berpidato dalam suatu malam kesenian pada saat para hadirin mengharapkan hiburan segera dimulai. Yang pertama dapat dihindarkan dengan menanggung atau memajukan harinya, sedangkan yang kedua dengan memberikan pidato yang singkat, tetapi padat (Effendy, 2015).

b. Pemilihan media komunikasi

Untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat memilih salah satu atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan disampaikan, dan teknik yang akan

dipergunakan. Mana yang terbaik dari sekian banyak media komunikasi itu tidak dapat ditegaskan dengan pasti sebab masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sebagai contoh pesan melalui media tulisan atau cetakan dan media visual dapat dikaji berulang-ulang dan disimpan sebagai dokumentasi. Pesan melalui media aural dapat didengarkan pada saat mata dan tangan dipergunakan untuk mengindera hal-hal lain, umpamanya mendengarkan berita radio ketika sedang mengemudikan mobil. Pesan melalui media audio visual dapat ditangkap secara lengkap, dapat dilihat dan didengarkan (Effendy, 2015).

c. Pengkajian Tujuan pesan komunikasi

Pesan komunikasi (message) mempunyai tujuan tertentu. Ini menentukan teknik yang harus diambil, apakah teknik informasi, teknik persuasi atau teknik instruksi. Jadi apapun tekniknya, pertamanya komunikasi harus mengerti pesan komunikasi itu.

d. Peranan komunikator dalam komunikasi

Ada faktor penting yang pada diri komunikator bila ia melancarkan komunikasi yaitu, daya tarik sumber (*source attractive*) dan kredibilitas sumber (*source credibility*). 1) **Daya tarik sumber**, Seorang komunikator akan berhasil dalam komunikasi, akan mampu mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan melalui mekanisme daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta

dengannya. Dengan lain perkataan, komunikasi merasa ada kesamaan antara komunikator dengannya sehingga komunikasi bersedia taat pada isi pesan yang dilancarkan oleh komunikator. 2) **Kredibilitas sumber.** Faktor kedua yang bisa menyebabkan komunikasi berhasil ialah kepercayaan komunikasi pada komunikator. Kepercayaan ini bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator. Seorang dokter akan mendapat kepercayaan kalau ia menerangkan soal kesehatan.(Effendy, 2015).

4. Pengawasan Pemilu Partisipatif

Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang bertujuan mempengaruhi kebijakan politik, yang dalam hal ini bertujuan untuk mengawal proses pelaksanaan pemilu agar terpilih pemimpin yang memang benar diinginkan rakyat dan melalui proses yang jujur dan adil. Berdasarkan manfaatnya, partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga (Surbakti dan Supriyanto, 2013) dalam (Afifuddin, 2020). Pengelompokan partisipasi berdasarkan manfaat itu dapat disederhanakan dalam table berikut.

Tabel 5. Pengelompokan partisipasi masyarakat dalam pemilu berdasarkan manfaatnya.

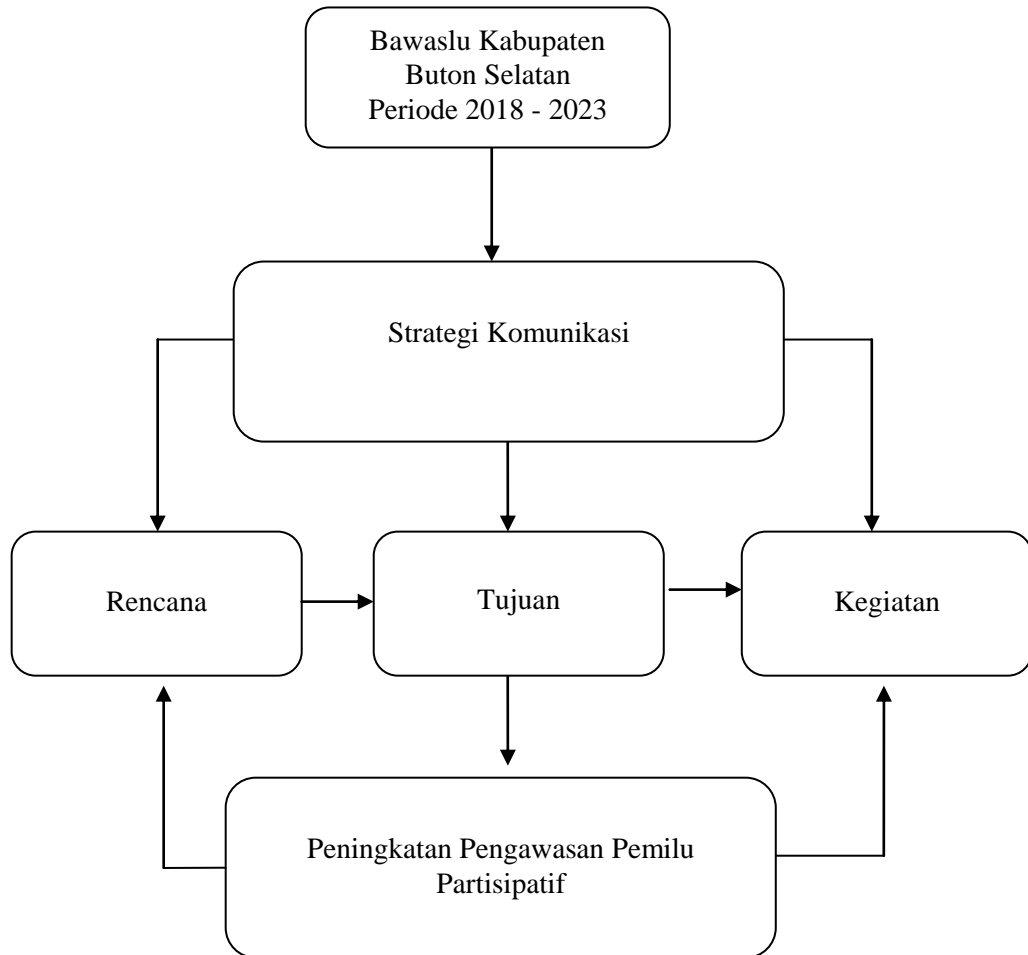
Meningkatkan minat dan informasi kepemiluan	Legitimasi keterpilihan	Integritas Hasil Pemilu
Sosialisasi pemilu	Memilih calon dan pasangan calon	Pemantauan dan pengawasan
Pendidikan pemilih	Musyawarah, membahasa rencana visi, misi, dan program partai dalam	Pelaksanaan penghitungan cepat atas hasil pemungutan suara

	pemilu	di TPS
Pemberitaan dan penyiaran media massa	Dukungan aktif kepada peserta pemilu/calon	
Survey dan penyebarluasan hasil survey	Mengajak dan mengorganisasikan dukungan atau keberatan terhadap alternatif rencana kebijakan public	

Pengawasan partisipatif, adalah upaya mendekatkan masyarakat dalam pelaksanaan tahapan untuk mampu mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan, yang setiap tahapannya memiliki banyak potensi dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan. Meningkatnya manfaat kontingen demokrasi memberi makna “demokrasi-sejati”, insentif untuk mengundang pengamat, menghasilkan keyakinan yang meluas hanya bahwa semua demokrat sejati mengundang pengawas pemilu; karena itu, tidak mengundang pengamat menjadi sinyal yang tidak ambigu bahwa pemerintah tidak mendemokratisasi bahkan memberikan alasan pseudo-demokrat untuk mengundang pengamat dan mengambil laporan resiko negatif (Hyde, 2011)

Dalam pengawasan pemilu, partisipasi masyarakat merupakan strategi Bawaslu dalam meningkatkan kualitas hasil pemilu di Indonesia yang sesuai dengan cita-citta luhur bangsa. Karena semakin banyak masyarakat ikut andil dalam partisipasi pengawasan pemilu berarti akan mempengaruhi tercapainya pemilu yang sesuai dengan asas “langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia” serta “Jujur dan Adil”. Dengan kata lain, hal itu juga akan membuat pemilu terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang dapat menciptakan berbagai konflik di masyarakat(Afifuddin, 2020).

B. KERANGKA PIKIR



Bagan 1 : Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan agar informasi yang lebih mendalam sesuai dengan latar belakang penelitian. Tujuannya yaitu agar peneliti dapat mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Guzman & Oktarina, 2018)

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang dihasilkan atau didapatkan dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan kepada informan dilapangan selama penelitian berlangsung.

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari beberapa narasumber atau informan yang memiliki kompetensi dan otoritas terhadap masalah yang peneliti kemukakan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dihasilkan atau didapatkan dari *study* perpustakaan, literatur internet, dokumen-dokumen output Bawaslu, bulletin Bawaslu, publikasi yang bersifat terdiri dari teori, kajian-kajian yang mendukung penelitian dan bersifat penting dan menunjang dalam penyusunan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Kategoris

Kategoris adalah instrument utama dalam penelitian strategi komunikasi Organisasi. Disini peneliti mengkategorisasikan strategi komunikasi dan pengawasan pemilu partisipatif dari Komunikasi Organisasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.

b. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara adalah percakapan antara periset—seseorang yang berharap mendapatkan informasi—dan informan—seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek (Berger, 2000,h.111). Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dengan alasan agar peneliti dapat memperoleh informasi sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan latar belakang penelitian yang berdasarkan pedoman wawancara yang telah di buat. Informan penelitian adalah mengambil objek di dalam lingkup Kantor Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah mereka yang memiliki otoritas dan kapasitas sehubungan dengan peran dan fungsi dalam peningkatan dan pengembangan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat serta valid sebagai informasi kunci dalam proses penelitian ini. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh informasi lebih banyak dari informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah : Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, salah seorang staf subbagian pengawasan pemilu dan seorang kader Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dengan uraian informan sebagai berikut

Tabel 6. Daftar Informan penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Usia
1	Mahyudin, S.Sos.,M.Si	Ketua Bawaslu Kab. Buton Selatan	S2	36 tahun
2	L.M. Suharjono, S.Pd.,M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Busel	S2	41 tahun
3	Falmawati, S.Pd	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Kab. Busel	S1	31 tahun
4	La Ode Utriyansah, SE	Alumni Kader SKPP Dasar dan Menengah tahun 2021	S1	24 tahun
5.	SAWALUDIN, S.Pd	Staf Subbagian Administasi Bawaslu Kab. Busel	S1	26 tahun

c. Observasi partisipan

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti adalah bagian dari sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton Selatan yang melakukan pengamatan secara langsung dan mengambil peran terhadap aktivitas serta kegiatan komunikasi yang dilakukan dari kurun waktu 2018-2021.

d. Literatur review

Peneliti berusaha memperoleh sumber informasi dan pengetahuan pendukung dalam penelitian ini, sehingga dapat dijadikan pegangan maupun referensi lanjutan yaitu dengan study kepustakaan untuk mempelajari, meneliti dan mengkaji literatur-literatur baik berupa buku, jurnal, arsip, bulletin Bawaslu serta dokumen berupa MoU Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dengan pihak eksternal dalam rangka meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif.

e. Dokumentasi

Pada penelitian ini, dokumentasi terbagi menjadi beberapa jenis :

1. Audio merupakan dokumentasi berupa suara rekaman hasil wawancara terhadap narasumber. 2. Visual, dokumentasi berupa foto maupun gambar. Terdapat pula, literatur pendukung seperti hasil jurnal, tesis, skripsi, hasil-hasil penelitian sebelumnya serta dokumen output bawaslu berupa arsip dan catatan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan berupa MoU dengan pihak eskternal sehubungan dengan pengawasan pemilu partisipatif, bulletin

Bawaslu Kabupaten Buton Selatan yang memuat dokumentasi kegiatan pengawasan pemilu partisipatif serta adapula data yang tersimpan dalam laman Bawaslu.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (Interactive Model of Analysis). Menurut Miles dan Huberman (2014) dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (data collecting) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan dalam analisis model interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Reduksi data (data reduction), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Sehingga data yang diambil adalah benar-benar yang dibutuhkan saja, dan yang tidak dibutuhkan bisa di kesampingkan.
- b. Penyajian data (data display), yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

- c. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing), kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksudmaksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

Dari penelitian diatas maka penulis menganalisa data dengan langkah sebagai berikut : melakukan analisis data secara terus-menerus sejak awal penelitian dan selama proses penelitian, setelah data berhasil dikumpulkan melalui pengamatan Langsung (observasi), wawancara dengan informan dan mendapatkan arsip/dokumen, maka kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan peneliti agar lebih focus pada rumusan masalah yang ingin dicapai, selanjutnya mereduksi data, kemudian disimpulkan dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan obyek penelitian di Kantor Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.

E. Tempat dan Jadwal Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dengan alamat lingkungan Batuatas, Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.

2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 1 Desember hingga 31 Desember 2021.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

Sejak di bentuknya Kabupaten Buton Selatan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, tentunya segala sesuatu yang berhubungan dengan kelembagaan daerah baru dibentuk, baik secara vertical maupun horizontal dalam sistim pemerintahan daerah.

Salah satu lembaga yang dibentuk adalah penyelenggara pemilu. Di Buton Selatan sudah melalui dua kali pemilihan dan satu kali pemilu. Pemilihan pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017 yaitu pemilihan Bupati Buton Selatan, pemilihan kedua di Buton Selatan yaitu pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 serta Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak tahun 2019.

Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Buton Selatan saat pemilihan Bupati Buton Selatan tahun 2017 dibentuk dengan menggunakan Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan sifatnya masih *adhoc*, begitupula pada pemilihan Gubernur tahun 2018, Panwaslu Buton Selatan dibentuk masih menggunakan undang-undang yang sama serta secara kelembagaan masih bersifat *adhoc*. Pada pemilu serentak tahun 2019, pembentukan penyelenggara pemilu sudah menggunakan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dan kelembagaan tingkat Kabupaten/Kota sudah bersifat tetap dan berganti nama menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kelembagaan Panwaslu maupun Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota mengalami dinamika sesuai dengan tuntunan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas, wewenang dan kewajibannya pun mengalami perubahan demi mewujudkan pemilihan/pemilu yang lebih demokratis, bermartabat dan berintegritas.

Lembaga pengawas pemilu di bentuk untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggara pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan tingkatan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pemilu di mulai dan di bubarkan sebelum calon yang terpilih dalam pemilu/pilkada dilantik dengan masa tugas 10 bulan, pada pemilihan gubernur tahun 2018 kelembagaan pengawas pemilu di bentuk melalui undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.

Pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, kelembagaan pengawas pemilu mengalami perubahan bukan lagi bersifat *ad hoc* tetapi sudah menjadi permanen dengan nama Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk tingkat Kabupaten/Kota dengan masa jabatan 5 tahun. Dalam pembentukannya kelembagaan Bawaslu menggunakan Undang-Undang No 7 tahun 2017.

Seiring dengan perubahan tersebut tentunya kewenangan bawaslu mengalami beberapa penguatan dari undang-undang pemilu sebelumnya.

1.1. Visi Dan Misi

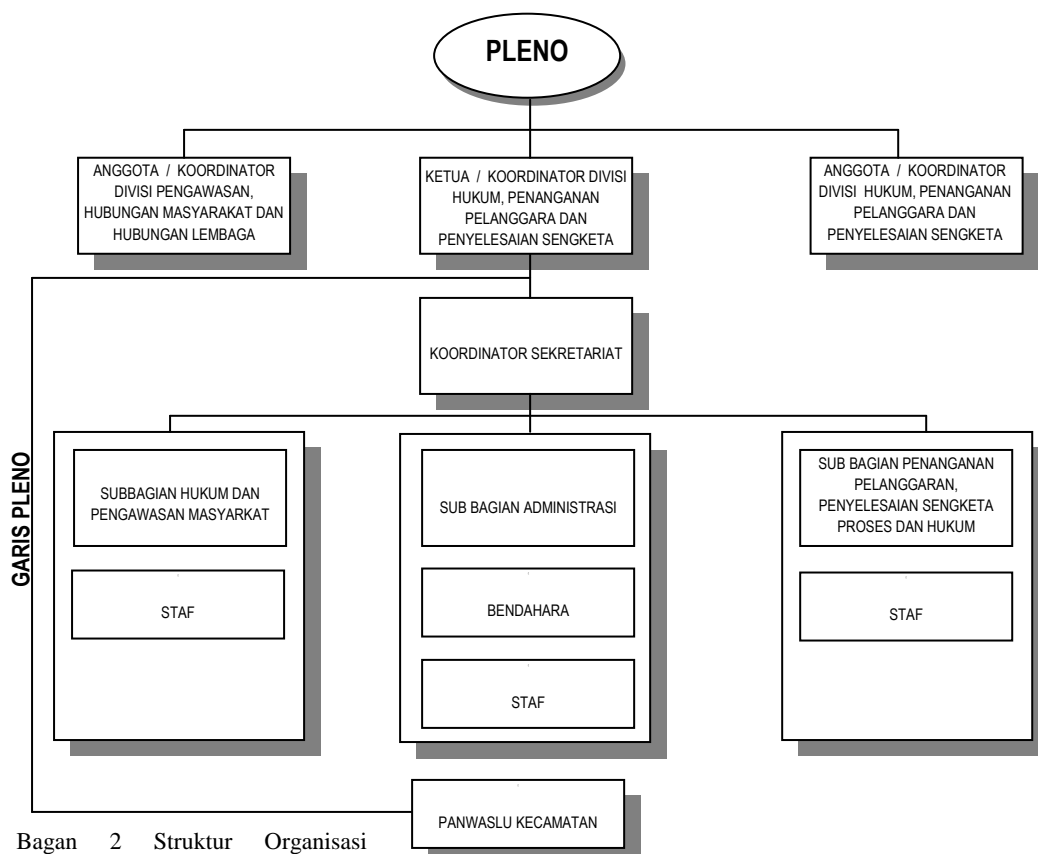
Visi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan adalah “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”

Misi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan adalah merujuk kepada visi dan misi Bawaslu Republik Indonesia yakni : (1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif; (2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana; (3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi; (4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel; (5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi>, n.d.)

1.2. Struktur Organisasi

Bawaslu Kabupaten Buton Selatan berdasarkan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota dengan kategori B dengan 3 (tiga) komisioner. Unsur Bawaslu Kabupaten Buton Selatan yang terdiri 3 (tiga) Komisioner dimana salah satu diantaranya

adalah Ketua yang dipilih berdasarkan pleno dari ketiga anggota. Dari tiga komisioner ini berdasarkan hasil pleno membagi tugas sebagai koordinator divisi yang terdiri atas tiga divisi yaitu : (1) Divisi Pengawasan dan hubungan masyarakat; (2) Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa (3) dan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, data dan Informasi. Sebagai supporting system Bawaslu memiliki Sekretariat yang di pimpin oleh seorang Koordinator Sekretariat atau Kepala Sekretariat yang membawahi 3 Subbagian yakni : (1) Subbagian Pengawasan dan Hubungan masyarakat; (2) Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum; (3) Subbagian Administrasi. Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2 Struktur Organisasi Bawaslu Kab. Buton Selatan

1.3.Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

a. Tugas Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

Bawaslu Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan amanat (UU No.7 Tahun 2017, n.d.) memiliki **tugas** antara lain:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
 1. Pelanggaran pemilu; dan
 2. Sengketa proses pemilu
- b. Mengawasi tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Buton Selatan yang terdiri atas :
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten Buton Selatan;
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten Buton Selatan;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Buton Selatan;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton Selatan dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan;

- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten Buton Selatan, yang terdiri atas:
 - 1. Putusan DKPP;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan;
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan KPU Kabupaten Buton Selatan; dan
 - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penrusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Buton Selatan;
 - h. Mengawaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a UU No.7 tahun 2017 , Bawaslu Kabupaten Buton Selatan bertugas:
- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Buton Selatan;

- b. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Buton Selatan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten Buton Selatan;
- 2) Dalam melakukan penindatran pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a UU No.7 tahun 2017 , Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten Buton Selatan;
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Buton Selatan;
 - c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Buton Selatan;
 - d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Buton Selatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- 3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a UU No.7 tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan bertugas:
- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Buton Selatan;
 - b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Buton Selatan;

- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ Buton Selatan;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Buton Selatan.

b. Wewenang Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

Berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 pasal 103, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan memiliki **kewenangan** antara lain:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU No.7 tahun 2017;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan ' memuhrs penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten Buton Selatan;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten Buton Selatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta ddam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU No.7 tahun 2017;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangari sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perattrran perundang-undangan;

- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Buton Selatan;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan Bawaslu Provinsi dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

Lebih lanjut pada pasal 104 Undang-Undang No. 7 tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan **berkewajiban**:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tatrapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton Selatan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten Buton Selatan;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton Selatan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Logo Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

Gambar 4.1. Logo Bawaslu Kabupaten Buton Selatan



Logo Bawaslu adalah kebutuhan akan internalisasi nilai dan semangat baru Bawaslu, yang ringkasnya dituang dalam slogan “Bersama rakyat Awaslu Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu”. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 tahun 2012 tentang Pedoma Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah mengatur setiap lembaga Negara harus mempunyai logo sebagai identitas lembaganya. Adapun logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa symbol atau huruf yang digunakan dalam tata naskah dinas instansi pemerintah sebagai identitas agar public lebih mudah mengenalnya. Secara visual, logo Bawaslu terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. Kotak suara pemilihan umum;
2. Dua buah telapak tangan konfigurasi untuk menggambarkan kedua bentuk tangan yang menciptakan hexagon (segi enam) atau kubus bervolume;
3. Dua telapanl tangan berwarna merah dan emas;
4. Visual tersembunyi berupa anak panah yang mmemengarah keatas; dan
5. Tulisan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan berwarna hitam.

Adapun, makna logo Badan Pengawas Pemilu adalah :

1. Kotak suara sebagai ikon umum dari Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia;
2. Dua buah telapak tangan dalam posisi melindungi atau menjaga kotak suara; mempresentasikan peran pengawas pemilu bersama dengan seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga dan mengawasi berlangsungnya penyelenggaraan pemilu di Indonesia agar berjalan sukses, adil dan transparan sesuai slogan baru yang dimiliki oleh Bawaslu.
3. Warna merah diadaptasi dan warna identitas bendera Indonesia yang mempresentasikan semangat kebangsaan yang diaplikasikan dalam semangat berdemokrasi dalam pemilu.
4. Warna emas menyimbolkan warna keagungan dan nilai kesucian yang harus di junjung tinggi dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
5. Huruf utama yang digunakan dalam logo adalah Gotham Pro Narrow Bold, dipilih karena memiliki kesan modern, solid, resmi namun masih berkarakter formal dan memiliki tingkat keterbatasan yang baik meskipun logo mengalami pengecilan ukuran.

1.5.Saluran Komunikasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

1. Laman Resmi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

Bawaslu Kabupaten Buton Selatan sebagai organisasi publik dituntut untuk selalu informative terhadap apa yang dilakukan atau

dikerjakan sebagai tanggung jawab kepada publik atau masyarakat Kabupaten Buton selatan. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi kepada khalayak, maka penggunaan internet untuk menunjang kegiatan Bawaslu secara khusus adalah bidang kehumasan, bukan hanya sebagai media penyampaian informasi secara cepat, tepat dan murah tetapi juga untuk menggalang dan memperhatikan dukungan publik.

Menurut Kriyantono (2006) dalam (Afifuddin, 2020), penggunaan internet dalam kehumasan memiliki beberapa manfaat diantaranya sebagai sarana membina hubungan dengan pemangku kepentingan dan sebagai media promosi, sehingga Bawaslu Kabupaten Buton Selatan memaksimalkan penggunaan laman resmi sebagai salah satu media komunikasi untuk mendukung kegiatan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan diantaranya adalah kegiatan kehumasan dan laman resmi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan yakni www.butonselatan.bawaslu.go.id.

2. Penggunaan Media Sosial

Belakangan ini penggunaan media sosial menjadi platform yang sangat dikenal bagi humas untuk mengaplikasikan komunikasi publik. Media sosial dinilai sebagai sarana yang efektif sebagai sarana dalam menjalankan komunikasi strategis.

Pengelolaan media Sosial Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dimulai sejak tahun 2018 disaat terbentuknya Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

dan platform yang dimaksimalkan penggunaannya adalah facebook (Bawaslu Kabupaten Buton Selatan) dan platform berikutnya adalah twitter (@Bawaslu Buton Selatan).

Sebagai pengelola dari sosial media facebook Bawaslu Kabupaten Buton Selatan adalah staf Bawaslu Kabupaten Buton Selatan yang bertugas pada bidang kehumasan dan staf yang bertugas pada bidang informasi dan data.

Konten yang di unggah pada akun facebook adalah kegiatan Bawaslu Kabupaten Buton selatan berupa laporan foto dengan takarir (*caption*) yang menceritakan isi kegiatan tersebut, kemudian turut serta mentautkan dengan akun facebook pimpinan Bawaslu, Koordinator Sekretariat dan semua staf Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.

Hal lain yang ditampilkan dalam akun media sosial facebook adalah konten yang bersifat edukatif dengan bentuk komunikasi yang partisipatif dan interaktif mengenai pengetahuan publik mengenai pengawasan dan keadilan pemilu dan terlebih menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif.

3. Penerbitan Buletin Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

Sebagai sarana untuk menyalurkan informasi kepada publik, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menggagas pembuatan dan penerbitan Buletin yang dimulai sejak Januari 2019 dan sekarang

sudah masuk edisi ke-V dan saat ini dalam proses penyusunan bulletin edisi ke-VI.

Bulletin memiliki peran yang sangat penting sebagai saluran komunikasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, didalamnya memuat berita dan dokumentasi kegiatan Bawaslu serta saluran untuk menuangkan gagasan, ide dan pendapat serta opini kedalam tulisan dari pimpinan hingga staf Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.

B. Strategi Komunikasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif

1. Pembentukan Desa binaan pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

a. Desa Lawela Kecamatan Batauga

Untuk meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dimulai dari gagasan yang dikemukakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Bapak Mahyudin, S.Sos.,M.Si sebagai pimpinan tertinggi di Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dengan melakukan komunikasi horizontal dengan pimpinan lainnya dalam internal pimpinan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, kemudian diadakan pembahasan kembali dengan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.

Adapun gagasan yang beliau kemukakan pada adalah dengan mengemukakan ide Desa Binaan Pengawasan Pemilu Partisipatif

sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Bapak Mahyudin S.Sos.,M.Si sebagai berikut:

“Peningkatan pengawasan pemilu partisipatif dari masyarakat Kabupaten Buton Selatan menjadi perhatian Bawaslu saat ini pasca pemilu tahun 2019, dimana berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang masuk dan tercatat atau teregister pada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan tidak ditemukan sama sekali adanya laporan dari masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi, disisi lain kita mendengar adanya selentingan di banyak tempat tentang adanya pelanggaran pemilu di setiap tahapan pemilu dan yang paling krusial adalah menjelang pemungutan suara pada saat masa tenang. Dimasa tenang ini harusnya peserta pemilu tidak melakukan kampanye namun yang terjadi adalah maraknya kegiatan money politic yang diistilahkan dengan serangan fajar. Berdasarkan hal itulah mengapa kami memulai sebuah gagasan tentang Desa Binaan Pengawasan Partisipatif, dan program ini kami launching pada bulan Desember 2019”.

Setelah memutuskan ide desa binaan pengawasan partisipatif yang dikemukakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, kemudian melalui proses komunikasi secara horizontal dengan dua anggota bawaslu lainnya bersama Koordinator sekretariat adalah melakukan komunikasi secara eksternal dengan Kepala Desa Lawela Selatan dan Kepala Desa Watiginanda untuk membahas perihal Desa binaan pengawasan partisipatif sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Bapak Mahyudin, S.Sos.,M.Si sebagai berikut:

“Setelah berkomunikasi dengan pimpinan Bawaslu lainnya kemudian kami melakukan koordinasi dengan pihak Kepala Desa masing-masing Kepala Desa Lawela Selatan dan Desa Watiginanda dengan jadwal berbeda untuk membahas tentang rencana Desa binaan pengawasan partisipatif ini, program-program yang akan kita tawarkan kepada Pemerintah Desa sehubungan dengan desa binaan pengawasan partisipatif, ada 4 program pelaksanaan Desa Binaan Pengawasan partisipatif yaitu 1)Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia melalui program dari Desa belajar pemilu. 2) Pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif yang berbasis kelompok masyarakat. 3)Sosialisasi pelaksanaan Desa Anti politik uang, politisasi SARA dan berita hoax. 4) Pengembangan program pengawasan partisipatif berbasis kearifan lokal. Dengan tujuan untuk meningkatkan

pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan pemilu selain itu menumbuh kembangkan pemilu cerdas tanpa politik uang dan kami berharap pula, bahwa program desa binaan pengawasan partisipatif ini dapat meminimalisir pelanggaran pemilu serta dapat memahami pentingnya pemilu dalam menentukan pemimpin kedepan sehingga bisa membawa masyarakat menuju kesejahteraan”.

Kondisi koordinasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan secara kelembagaan dengan pemerintah Desa Lawela dan Desa Watiginanda adalah komunikasi organisasi dengan pihak Eksternal sebagaimana dikemukakan dalam landasan teori pada bab landasan teori bahwa komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak diluar organisasi. Tujuannya adalah menciptakan dan memelihara niat baik (good will) dan saling pengertian antara organisasi dengan khalayak (Poppy Ruliana, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas ditemukan bahwa ada 4 program yang ditawarkan pada desa desa binaan pengawasan partisipatif yaitu :

- 1) Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia melalui program Desa belajar pemilu.
- 2) Pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif yang berbasis kelompok masyarakat.
- 3) Sosialisasi pelaksanaan Desa Anti politik uang, politisasi SARA dan berita hoax dan
- 4) Program pengembangan pengawasan partisipatif berbasis kearifan lokal.

Komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan Bawaslu dengan Kepala Desa Lawela dan Kepala Desa Watiginanda sebagai komunikasi awal untuk

mewujudkan rencana Bawaslu untuk mengimplementasikan strategi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif, kemudian dikembalikan kedalam internal Bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk mempersiapkan kegiatan Launching desa binaan pengawasan partisipatif. Pelaksanaan launching desa binaan pengawasan partisipatif sebagai langkah awal pelaksanaan desa binaan pengawasan partisipatif seperti yang dikemukakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan sebagai berikut:

“Sebagai langkah awal dari program desa binaan pengawasan partisipatif, yang pertama dilakukan dengan mengadakan kegiatan launching Desa pengawasan Partisipatif yang langsung dirangkaikan dengan diskusi publik tentang pembinaan penindakan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan di Desa binaan pengawasan partisipatif Desa lawela”

Selaras dengan pernyataan yang diatas, maka Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton Selatan sebagai berikut:

“Untuk menunjang program Desa Binaan pengawasan partisipatif, maka Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menyiapkan rancangan kegiatan launching desa binaan pengawas partisipatif ini dengan melibatkan staf bawaslu untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan”

Sehubungan dengan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi pembagian tugas terhadap staf-staf yang akan bertugas demi berhasilnya kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan organisasi. Situasi pembagian tugas kepada staf-staf Bawaslu Kabupaten Buton Selatan ini sesuai dengan teori komunikasi internal dengan bentuk komunikasi vertikal dimana komunikasi yang berlangsung dari atas kebawah (*downward communication*) sebagaimana dikemukakan Katz dan Kahn (Rahman, 2000) bahwa ada lima jenis tipe *downward communication*, yaitu : a) *Job instruction* (instruksi) kerja, yakni komunikasi yang merujuk pada

penyelesaian tugas-tugas khusus. b) *Job rationale* (rasio kerja), yakni komunikasi yang menghasilkan pemahaman terhadap tugas dan hubungan dengan pengaturan lainnya.c) *procedure and practice* (procedure pelaksanaan) yakni komunikasi tentang kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, regulasi dan manfaat-manfaat yang ada. d) Feedback (umpan balik), yakni komunikasi yang menghargai tentang bagaimana individu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. e) *Introduction of goals* (doktrin atas tujuan), yakni komunikasi yang dirancang dengan karakter ideology yang memberikan motivasi karyawan tentang pentingnya misi organisasi secara keseluruhan(Poppy Ruliana, 2018).

Relevan dengan yang dikemukakan diatas terhadap proses manajemen yang dilakukan sebagai tujuan dan fungsi komunikasi di internal Bawaslu Kabupaten Buton Selatan seperti yang dikemukakan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Bapak La Ode Muh. Suharjono, S.Pd.,M.Si adalah sebagai berikut:

“Dalam perencanaan kegiatan Desa Binaan Pengawasan partisipatif, setelah melihat alokasi anggaran yang diturunkan kepada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, kami bahas secara serius dengan 3 (tiga) pimpinan yakni Pak Ketua dan dua anggota Bawaslu lainnya serta kami berdua saya sendiri Koordinator Sekretariat bersama dengan bendahara untuk membahas perihal penganggaran kegiatan yang akan dilakukan nanti serta bagaimana nanti pelaksanaannya termasuk tugas-tugas khusus yang akan disampaikan kepada masing-masing staf untuk melakukan tugas atau tanggungjawab apa yang akan dilaksanakannya.

Pernyataan diatas dikuatkan dengan hasil wawancara dengan staf Bawaslu Falmawati, S.Pd mengatakan bahwa:

“ Pak Korsek mengadakan rapat bersama kami untuk membahas pelaksanaan kegiatan perencanaan pelaksanaan Desa binaan pengawasan partisipatif, kemudian memberikan tugas kepada masing-masing staf atau secara kelompok untuk melaksanakan tugas tertentu misalnya koordinasi kembali dengan pihak Desa perihal penyiapan gedung pertemuan, teknis pelaksanaan acara, serta dokumen lain yang diperlukan.

Pernyataan selaras juga dikemukakan Sawaludin, S.Pd staf bagian administrasi keuangan mengatakan bahwa:

“Saya dalam rapat persiapan launching Desa Pengawasan Partisipatif yang akan dilaksanakan di Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga dan Desa Watiginanda Kecamatan Sampolawa oleh kepala Sekretariat saya mendapat tugas untuk mempersiapkan administrasi laporan pertanggungjawaban keuangan seperti daftar hadir kegiatan, daftar penerimaan transportasi serta honorarium narasumber”

Lebih lanjut disampaikan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton Selatan L.M. Suharjono, S.Pd adalah

“Pada saat pelaksanaan launching desa binaan saya sebagai Koordinator Sekretariat senantiasa memberikan pengarahan terhadap apa yang dikerjakan oleh staf Bawaslu serta melakukan pengawasan kepada staf yang melakukan tugas agar tetap sesuai dengan perencanaan”

Berdasarkan pernyataan diatas dalam komunikasi organisasi bahwa pernyataan Koordinator sekretariat adalah bagian dari fungsi komunikasi yakni bagian dari fungsi komando dengan teori fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh Conrad (1985) yang menyatakan dua fungsi organisasi yaitu fungsi komando dan fungsi relasi yang salah satu poinnya adalah mengarahkan dan membatasi tindakan.

Sebagai saluran komunikasi dalam program Desa binaan pengawasan partisipatif maka Bawaslu Kabupaten Buton Selatan bersama dengan desa binaan pengawasan partisipatif melakukan penandatanganan Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dengan pihak desa binaan partisipatif yakni Desa Lawela Kecamatan Batauga dan Desa Watiginanda Kecamatan Sampolawa sebagai bukti kerjasama dalam pembinaan pengawasan partisipatif sebagaimana yang peneliti temukan pada data sekunder berupa dokumen Nota kesepahaman seperti yang dimaksud diatas yang ditandatangani oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dengan Desa Lawela Kecamatan Batauga pada tanggal 28 November 2019.

2. Pembentukan Kader Muda Pengawasan

Sebagai program kedua yang diluncurkan oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan sebagai strategi komunikasi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pemilu adalah pembentukan Kader Muda Pengawasan partisipatif sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Mahyudin, S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa:

“ Sebagai upaya Bawaslu Busel untuk meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif yang kedua adalah Bawaslu Busel menggelar kerjasama bersama mahasiswa yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang dipilih sebagai kader muda pengawasan partisipatif karena strategisnya peran mahasiswa ditengah masyarakat melalui tugas dan fungsinya dalam aplikasi tri dharma perguruan tinggi antara lain pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, kedua kader muda pengawasan partisipatif harus membumikan nilai-nilai pengawasan. Mahasiswa menjadi elemen penting dalam setiap pengawasan pemilu. Pemilu sebagai bentuk pesta demokrasi rakyat semestinya menjadi ruang keterlibatan masyarakat untuk saling menjaga setiap prosesnya. Bawaslu sebagai otoritas pengawasan pemilu tidak mampu bekerja sendiri, dibutuhkan kolaborasi dengan masyarakat sipil menjadi penting dalam menegakkan hukum pemilu. Ketiga sebagai bahan pembelajaran bagi adik-adik mahasiswa untuk mengetahui lagi secara dalam tentang pemilu, demokrasi dan cara kerja bawaslu. Harapannya kader muda pengawasan partisipatif membantu Bawaslu mensosialisasikan pelanggaran pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemilu maupun pilkada, yang lebih penting lagi mampu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.”

Pembentukan kader muda pengawasan partisipatif dengan mengajak unsur organisasi mahasiswa merupakan implementasi dari komunikasi organisasi yakni komunikasi eksternal serta pemanfaatan dari jaringan komunikasi. Strategi komunikasi yang diimplementasikan adalah

komunikasi organisasi terhadap kelompok tertentu yakni kelompok mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan.

3. Program Bawaslu Busel go to school

Tujuan program bawaslu go to school yaitu menasar calon pemilih pemula dimasa datang akan menjadi wajib pilih baik pemilu maupun pemilihan serta memberikan pemahaman tentang pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Ketua Bawaslu dalam wawancaranya perihal Bawaslu go to school beliau menyatakan bahwa :

“Program Bawaslu Go to school ini adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi pemilih pemula. Calon pemilih pemula diharapkan untuk benar-benar memahami hak pilihnya sebagai pemilih dan berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu, selain itu masyarakat tidak perlu takut melaporkan bila ada indikasi pelanggaran pemilu ke Kantor Bawaslu Kabupaten Buton Selatan. Kami akan menjamin keamanan dan status masyarakat akan dirahasiakan. Kami berpesan kepada siswa-siswa bahwa pembangunan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat akan terwujud apabila pemimpin dilahirkan berkualitas. Langkah ini sebagai wujud agar pengawasan bawaslu pasca pemilu tahun 2019 terus berjalan. Hal ini pula sebagai bentuk publikasi pengawasan program bawaslu untuk menyongsong pemilu selanjutnya agar masyarakat bersiap secara psikologis bercermin dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya banyak pelanggaran yang tidak dilaporkan kepada Bawaslu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan sehingga informasi dan pengetahuan merasa perlu dilakukan lebih dini agar tercipta pemilu yang bersih pada pemilu yang akan datang”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diinterpretasikan sebagai implementasi dari tiga tujuan utama strategi komunikasi yang dikemukakan oleh Onong Uchjana Effendy yakni

- a. Untuk mengamankan pemahaman (*to secure understanding*).

- b. Untuk menetapkan penerimaan (*to establish acceptance*)
- c. Untuk memotivasi tindakan (*to motivate action*)(Effendy, 2015)

Bagaimana Bawaslu Kabupaten Buton selatan melalui Ketua Bawaslu memberikan pemahaman tentang pendidikan kepemiluan kepada pemilih pemula untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswa SMA yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih (*to secure understanding*), kemudian menetapkan penerimaan informasi tentang pemilu dan pelanggaran pemilu kepada komunikan (*to establish acceptance*) dan memotivasi agar pemilih pemula ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu bahkan dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.

4. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)

1. SKPP tahun 2020

Sekolah Kader Pengawasan partisipatif adalah program Nasional yang diluncurkan oleh Bawaslu Republik Indonesia yang melibatkan Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. SKPP pelaksanaannya dimulai tahun 2020 dimasa pandemic covid-19 sehingga pelaksanaannya dilakukan secara daring. Kegiatan ini adalah agenda produktif ditengah masa pandemic covid-19 yang bersifat edukatif terhadap masyarakat luas. Dikutip dari laman Bawaslu RI di www.bawaslu.go.id jumlah pendaftar kegiatan SKPP secara nasional berjumlah 20.665 orang dengan rincian 12.947 pendaftar laki-laki (63 persen) dan 7.718 pendaftar perempuan (63 persen)(*Bawaslu RI*, n.d.). berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari staf subbagian pengawasan Bawaslu Falmawati, S.Pd bahwa pendaftar dari Kabupaten Buton Selatan pada

kegiatan SKPP tahun 2020 secara daring ini sejumlah 9 orang terdiri dari 6 pendaftar laki-laki dan 3 pendaftar perempuan.

2. SKPP tahun 2021

Kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) oleh Bawaslu RI dilaksanakan dengan 3 level berbeda yaitu: SKPP tingkat Dasar, SKPP tingkat Menengah dan SKPP tingkat Lanjut sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

Penyelenggaraan SKPP tingkat Dasar pada tahun 2021 di provinsi Sulawesi Tenggara salah satu titik lokasi penyelenggaraan kegiatannya adalah di Kota Baubau dengan melibatkan peserta dari 3 Kabupaten Kota yakni Kabupaten Buton Selatan, Kota Baubau dan Kabupaten Buton.

Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menyambut baik dengan program SKPP tingkat dasar ini dengan mengerahkan SDM yang ada dalam internal Bawaslu untuk melakukan perekrutan kader SKPP dengan pendekatan komunikasi dengan tujuan agar lebih banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dari perspektif Bawaslu terutama tentang penanganan pelanggaran. Dari upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan tercatat bahwa pendaftaran kader SKPP Buton Selatan menjadi pendaftar terbanyak kedua setelah Kota Kendari dari 17 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dengan 76 pendaftar, untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya.

Harapan Bawaslu bahwa kader SKPP ini akan menjadi perpanjangan tangan bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu di masa yang akan datang.

Peneliti berhasil melakukan wawancara dengan salah seorang Alumni Kader SKPP yang berhasil mengikuti dua level SKPP yakni SKPP Dasar dan SKPP menengah, Utriansyah, SE, beliau mengurai perihal bagaimana tugas rencana tindak lanjut dari hasil dari pengkaderan SKPP untuk strategi komunikasi kepada masyarakat sebagai berikut :

“Tentunya sebagai kader harus memperhatikan kondisi masyarakat, jadi kami ada yang langsung *door to door* setiap rumah diharapkan rumah-rumah keluarga, orang yang sudah kita kenal karena kalau orang yang tidak kita kenal dikhawatirkan ada permasalahan yang tidak diinginkan, jadi orang-orang terdekat dulu memberikan pemahaman bagaimana memilih pemimpin yang baik seperti apa karena proses pemilu itu menentukan pemimpin kedepannya seperti apa”.

Dari pernyataan beliau diatas bahwa untuk melancarkan komunikasi sehubungan dengan pengawasan partisipatif maka komunikator harus terlebih dahulu mengenal komunikan yang akan mendengarkan informasi yang diberikan.

5. Hubungan antar komponen dalam strategi komunikasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

Hubungan antar komponen dalam strategi komunikasi yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan yang diterapkan pada program-program yang dilaksanakan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pemilu adalah:

a. Mengenali sasaran komunikasi

Sebelum kita melancarkan komunikasi kita harus mempelajari dulu siapa-siapa saja yang akan menjadi sasaran komunikasi kita itu.

Sudah tentu kita bergantung pada komunikasi apakah agar komunikasi hanya sekedar mengetahui (dengan metode informatif) atau agar komunikasi melakukan tindakan tertentu (metode persuasif atau instruktif), apa pun tujuannya apa pun tujuannya, metodenya, dan banyaknya sasaran, pada diri komunikasi perlu diperhatikan faktor-faktor yaitu faktor kerangka referensi dan faktor situasi dan kondisi (Effendy, 2015). Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan yaitu, didalam pengenalan sasaran Bawaslu Kabupaten Buton Selatan memiliki sasaran dalam pengawasan partisipatif pemilu yaitu seluruh masyarakat Kabupaten Buton Selatan yang terdaftar sebagai pemilih dan sebagai langkah awal adalah masyarakat Desa Lawela Kecamatan Batauga dan Desa Watiginanda Kecamatan Sampolawa sebagai Desa binaan pengawasan partisipatif. Dalam Penyampaian pesan tersebut Bawaslu menggunakan metode informative yaitu suatu pesan yang disampaikan kepada seseorang tentang hal-hal yang baru diketahuinya seperti halnya dalam penyampaian berita dalam media cetak maupun elektronik dan metode persuasive yang bersifat edukatif. Bawaslu juga membuat kegiatan-kegiatan yang salah satunya yaitu *Bawaslu go to school*. Program *Bawaslu go to school* ini menasar siswa SMA yang mempunyai hak pilih dan Bawaslu memilih 3 sekolah yakni SMA Negeri 1 Batauga, SMA Negeri 2 Batauga dan SMA Negeri 3 Batauga.

b. Pemilihan Media Komunikasi.

Untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat memilih satu atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan disampaikan, dan teknik yang akan dipergunakan. Mana yang terbaik dari sekian banyak media komunikasi itu dapat ditegaskan dengan pasti sebab masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan (Effendy, 2015). Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat dikatakan bahwa media komunikasi yang digunakan oleh Bawaslu dalam melaksanakan suatu strategi komunikasi yaitu media kelompok, yaitu mengadakan sosialisasi pada dua Desa Binaan Pengawasan partisipatif dan pelaksanaan program Bawaslu go to school kemudian turut berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI, hal ini menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan pengawasan partisipatif.

Dalam aktifitas komunikasi yang melibatkan khalayak lebih dari 15 orang, maka media komunikasi yang banyak digunakan adalah media komunikasi kelompok, misalnya rapat seminar dan konferensi. Rapat biasanya digunakan untuk membicarakan hal-hal penting yang dihadapi oleh suatu organisasi. Seminar adalah media komunikasi kelompok yang biasa dihadiri oleh khalayak tidak lebih dari 150

orang. Tujuannya adalah membicarakan suatu masalah dengan menampilkan pembicara, kemudian meminta pendapat atau tanggapan dari peserta seminar yang biasanya dari kalangan pakar sebagai nara sumber dan pemerhati dalam bidang itu (Cangara, 2017). Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menghadirkan pakar ilmu komunikasi sebuah kegiatan sosialisasi tentang penggunaan sosial media sebagai literasi media dalam penyelenggaraan pemilu untuk mencegah hoax, hate speech dan pelanggaran SARA. Komperensi adalah media komunikasi kelompok yang biasanya dihadiri oleh anggota dan pengurus organisasi tertentu.

c. Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi

Pesan komunikasi (*message*) mempunyai tujuan tertentu. Ini menentukan teknik yang harus diambil, apakah itu teknik informatif, teknik persuasif, atau teknik instruktif. Seperti telah disinggung di muka, apa pun tekniknya, pertama-pertama komunikasi harus mengerti pesan komunikasi itu. Seperti telah diterangkan sebelumnya, pesan komunikasi terdiri atas isi pesan (*the content of the message*) dan lambang (*symbol*). Isi pesan komunikasi bisa satu, tetapi lambang yang dipergunakan untuk menyampaikan isi komunikasi ialah bahasa, gambar, warna, kial (*gesture*), dan sebagainya (Effendy, 2015). Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat dikatakan bahwa isi pesan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan yaitu bersifat persuasif, edukatif dan informatif.

Penyampaian pesan persuasif dilakukan pada oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam implementasi kegiatan Desa binaan partisipatif, pembentukan kader muda pengawasan, program Bawaslu go to school dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan. Teknik komunikasi persuasive ini dilakukan dengan mengajak, menghimbau dan membujuk sasaran komunikasi untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 selain melakukan upaya persuasif dalam menyampaikan pesan mengajak atau menghimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dan mampu melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.

d. Peran komunikator dalam komunikasi

Ada faktor yang penting pada diri komunikator bila ia melancarkan komunikasi yaitu, daya tarik seorang sumber adalah seorang komunikator akan berhasil dalam komunikasi, akan mampu mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan melalui mekanisme daya tarik jika komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta dengannya. Yang kedua, kredibilitas sumber adalah kepercayaan komunikan kepada komunikator. Kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator (Effendy, 2015). Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam sosialisasi atau seminar yang digelar menggunakan komunikator yang memiliki kompetensi yang sesuai

dengan keahlian yang dimilikinya misalnya dalam launching Desa binaan partisipatif yang dirangkaikan dengan diskusi publik tentang penanganan pelanggaran pemilu khususnya sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan dengan media sosial sehingga masyarakat perlu mengetahui bagaimana agar dapat bertindak bijak dalam bermedia sosial, bertalian dengan komunikator yang memiliki keahlian dan dapat menyampaikan pesan yang bersifat edukatif, persuasif dan dapat dimengerti oleh komunikan misalnya Bawaslu menghadirkan komunikator ahli dalam Ilmu komunikasi yakni Bapak Ansar Suherman, S.I.P, M.I.Kom yang berbicara tentang Penguatan Kearifan Lokal di Era Digital.

6. Kendala dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

Upaya meningkatkan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Selatan terdapat kendala yang sangat signifikan disebabkan oleh masa pandemic covid-19 yang merebak sejak desember 2019 dan awal tahun 2020 menjadi waktu yang sangat berat ketika terjadi pembatasan pergerakan dalam rangka memutus mata rantai covid-19. Hal tersebut sangat berdampak pada banyak hal diantaranya adalah: 1) penganggaran dimana anggaran pemerintah difokuskan untuk penanganan covid-19. 2) larangan dalam membuat kerumunan selama masa *social*

distancing sehingga tidak memungkinkan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dengan melibatkan banyak orang.

Kendala yang disebabkan oleh covid ini menyebabkan program krusial yang diyakini dapat menjadi stimulant terhadap peningkatan pengawasan partisipatif pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menjadi tidak terlaksana dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Buton Selatan dalam pengawasan pemilu yang ditandai dengan minimnya laporan masyarakat terhadap adanya pelanggaran pemilu yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menjadi masalah yang krusial dalam pengawasan pemilu. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut maka peneliti yang bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi partisipan, literature review dan dokumentasi. Penelitian ini melalui beberapa proses diantaranya melakukan analisis data secara terus-menerus sejak awal penelitian dan selama proses penelitian, setelah data berhasil dikumpulkan melalui pengamatan langsung (observasi), wawancara dengan informan dan mendapatkan arsip/dokumen, maka kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan peneliti agar lebih focus pada rumusan masalah yang ingin dicapai, selanjutnya mereduksi data, kemudian disimpulkan dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan obyek penelitian di Kantor Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.

Program desa binaan pengawasan partisipatif, pembentukan kader muda pengawasan, Bawaslu go to school, SKPP adalah strategi komunikasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif yang kemudian sebagai korelasi antar komponen dalam strategi komunikasi

bawaslu Kabupaten Buton Selatan memperhatikan faktor-faktor antara lain: a) Mengenali sasaran komunikasi, b) Pemilihan media komunikasi, c) Pengkajian tujuan pesan komunikasi, d) Peran komunikator dalam komunikasi.

Kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam melaksanakan program-program yang sudah dilaksanakan adalah dengan kendala alam yakni adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan adanya social distancing hingga PSBB yang menyebabkan beberapa program yang sudah mulai dilaksanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut pula berimbas pada penganggaran yang dialokasikan untuk program-program Bawaslu Buton Selatan dialihkan untuk penanganan covid-19.

B. Saran

Untuk mengetahui bagaimana hasil dari strategi komunikasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dapat diketahui pada saat penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024 sehingga perlu penelitian lebih lanjut pada saat penyelenggaraan tahapan pemilu bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipasi yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas jumlah laporan pelanggaran pemilu yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan yang bersumber dari laporan masyarakat.

Perlu adanya penelitian komunikasi lebih lanjut sehubungan dengan faktor-faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu* (M. Hafidz (Ed.)). PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Ali Murtopo. (1978). *Strategi Kebudayaan*. Centre For Strategic and International Studies-CSIS.
- Bawaslu RI. (n.d.). <https://www.bawaslu.go.id>
- Cangara, H. (2017). *Perencanaan & Strategi Komunikasi* (3rd ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- David, F. (2002). *Manajemen Strategi Konsep*. Prehalindo.
- Effendy, O. U. (2015). *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek* (Tjun Surjamann (Ed.); 26th ed.). PT. Remaja Rosdakarya.
- Guzman, K. C., & Oktarina, N. (2018). Strategi Komunikasi Eksternal Untuk Menunjang Citra Lembaga. *Economic Education Analysis Journal*, 7(1), 301–315.
- <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi>. (n.d.). No Title.
<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi>
- Hyde, S. D. (2011). Catch Us If You Can: Election Monitoring and International Norm Diffusion. *American Journal of Political Science*, 55(2), 356–369. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2011.00508.x>
- UU No.7 Tahun 2017.
- M. Bachri Ghazali. (1997). *Dakwah Komunikatif*. Pedoman Ilmu Jaya.
- Mulawarman, K., & Rosilawati, Y. (2014). Komunikasi Organisasi Pada Dinas Perijinan Kota Yogyakarta Untuk Meningkatkan Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.30659/jikm.5.1.31-41>
- Pitri Yandri. (2017). The Political Geography of Voters and Political Participation: Evidence from local Election in Suburban Indonesia. *Indonesia Journal of Geography*, Vol.49, No.
- Poppy Ruliana. (2018). *KOMUNIKASI ORGANISASI Teori dan Studi Kasus* (Edisi 2). Rajawali Pers.
- Puadi. (2020). Meneguhkan Gerakan Pengawasan Partisipatif Pada Pilkada 2020, Mewujudkan Pilkada Demokratis. *Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta*, Edisi Agus, 73–99.
- Rakhman, S. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pengawasan Partisipatifdi Masa

- Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Edisi Agus*, 5–33.
- Ruben, B. D. & S. L. P. (2013). *Komunikasi dan Perilaku Manusia* (1st ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- Satma, N., & Putri, N. E. (2019). *STRATEGI KOMUNIKASI KPU KOTA PADANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU KADA TAHUN 2018*. 191–198.
- Situmorang, T. M. (2019). *Strategi Komunikasi Organisasi Pemerintahan Labuhan Batu Utara Dalam Melahirkan Kebijakan Pemberian Beasiswa MoU Bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Islam Sumatera Utara Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Wardana, A. A. (2020). *Strategi Humas Pemkot Madiun Dalam Mensosialisasikan Program Kerja Pemerintah Melalui Media Sosial (Studi di PPID Dinas Kominfo Kota Madiun)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Yulhardi. (2014). *Strategi Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru*. <http://repository.uin-suska.ac.id/3348/>
- Yuli Patilata. (2013). *STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI PENGURUS PUSAT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM MEMBENTUK MILITANSI KADER SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S . Kom . I) Oleh Yuli Patilata PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Mahyudin, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan

Waktu Wawancara :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan sehubungan dengan pengawasan pemilu partisipatif?	Yang kami lakukan yang berkaitan dengan pengawasan pemilu partisipatif ada beberapa program yang kami laksanakan yaitu : 1) Program Desa Binaan Pengawasan partisipatif, 2) pembentukan kader muda pengawasan, 3) program Bawaslu go school, 4) ikut menyukseskan program SKPP yang dilaksanakan secara daring di tahun 2020 di masa pandemi covid-19, dan penyelenggaraa SKPP tahun 2021 secara offline yang diadakan di Kota Baubau dengan peserta dari 3 Kabupaten, Kabupaten Buton Selatan, Kota Baubau dan Kabupaten Buton.
2.	Apa yang menjadi dasar dilaksanakannya desa Binaan pengawasan partisipatif sehubungan dengan peningkatan pengawasan partisipatif?	Peningkatan pengawasan pemilu partisipatif dari masyarakat Kabupaten Buton Selatan menjadi perhatian Bawaslu saat ini pasca pemilu tahun 2019, dimana berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang masuk dan tercatat atau teregister pada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan tidak ditemukan sama sekali adanya laporan dari masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi, disisi lain kita mendengar adanya selentingan di banyak tempat tentang adanya pelanggaran pemilu di setiap tahapan pemilu dan yang paling krusial adalah menjelang pemungutan suara pada saat masa tenang. Dimasa tenang ini harusnya peserta pemilu tidak melakukan kampanye namun yang terjadi adalah maraknya kegiatan money politic yang diistilahkan dengan serangan fajar. Berdasarkan hal itulah mengapa kami memulai sebuah gagasan tentang Desa Binaan Pengawasan Partisipatif, dan program ini kami launching pada bulan Desember 2019.

2.	<p>Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan untuk pelaksanaan desa binaan pengawasan partisipatif?</p>	<p>Setelah berkomunikasi dengan pimpinan Bawaslu lainnya kemudian kami melakukan koordinasi dengan pihak Kepala Desa masing-masing Kepala Desa Lawela Selatan dan Desa Watiginanda dengan jadwal berbeda untuk membahas tentang rencana Desa binaan pengawasan partisipatif ini, program-program yang akan kita tawarkan kepada Pemerintah Desa sehubungan dengan desa binaan pengawasan partisipatif, ada 4 program pelaksanaan Desa Binaan Pengawasan partisipatif yaitu 1)Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia melalui program dari Desa belajar pemilu. 2) Pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif yang berbasis kelompok masyarakat. 3)Sosialisasi pelaksanaan Desa Anti politik uang, politisasi SARA dan berita hoax. 4) Pengembangan program pengawasan partisipatif berbasis kearifan lokal. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan pemilu selain itu menumbuh kembangkan pemilu cerdas tanpa politik uang dan kami berharap pula, bahwa program desa binaan pengawasan partisipatif ini dapat meminimalisir pelanggaran pemilu serta dapat memahami pentingnya pemilu dalam menentukan pemimpin kedepan sehingga bisa membawa masyarakat menuju kesejahteraan.</p>
3.	<p>Bagaimana komunikasi yang dilakukan untuk memulai penyelenggaraan desa binaan pengawasan partisipatif?</p>	<p>Sebagai langkah awal dari program desa binaan pengawasan partisipatif , yang pertama dilakukan dengan mengadakan kegiatan launching Desa pengawasan Partisipatif yang langsung dirangkaikan dengan diskusi publik tentang pembinaan penindakan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Buton Selatan di Desa binaan pengawasan partisipatif Desa lawela</p>
4.	<p>Selain desa binaan pengawasan partisipatif, kegiatan komunikasi lainnya untuk</p>	<p>Sebagai upaya Bawaslu Busel untuk meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif yang kedua adalah Bawaslu Busel menggelar</p>

	<p>meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif?</p>	<p>kerjasama bersama mahasiswa yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang dipilih sebagai kader muda pengawasan partisipatif karena strategisnya peran mahasiswa ditengah masyarakat melalui tugas dan fungsinya dalam aplikasi tri dharma perguruan tinggi antara lain pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, kedua kader muda pengawasan partisipatif harus membumikan nilai-nilai pengawasan. Mahasiswa menjadi elemen penting dalam setiap pengawasan pemilu. Pemilu sebagai bentuk pesta demokrasi rakyat semestinya menjadi ruang keterlibatan masyarakat untuk saling menjaga setiap prosesnya. Bawaslu sebagai otoritas pengawasan pemilu tidak mampu bekerja sendiri, dibutuhkan kolaborasi dengan masyarakat sipil menjadi penting dalam menegakkan hukum pemilu. Ketiga sebagai bahan pembelajaran bagi adik-adik mahasiswa untuk mengetahui lagi secara dalam tentang pemilu, demokrasi dan cara kerja bawaslu. Harapannya kader muda pengawasan partisipatif membantu Bawaslu mensosialisasikan pelanggaran pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemilu maupun pilkada, yang lebih penting lagi mampu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.”</p>
--	---	--

Lampiran Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan
Bapak Mahyudin, S.Sos.,M.Si



Wawancara dengan Staf Pengawasan Bawaslu Buton Selatan
Falmawati, S.Pd



Wawancara dengan Koordinator Sekretariat Bawaslu Buton Selatan:
Bapak La Ode Muh. Suharjono, S.Pd.,M.Si



Wawancara dengan Alumni SKPP Dasar dan Menengah Utriyansah, SE